

**ANALISIS KATEGORI UNGGULAN PADA SISTEM
AGRIBISNIS DAN PERKEMBANGAN EKONOMI
WILAYAH KABUPATEN/KOTA
DI PROPINSI LAMPUNG**

Tesis

Oleh

EDI SUSANTO



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**LEADING CATEGORY IN AGRIBUSINESS ECONOMIC SYSTEM
AND ANALYSIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
OF REGENCY / KOTA AREAS
IN LAMPUNG PROVINCE**

ABSTRACT

The determination of pre-eminent category through Location Question (LQ) analysis tools and the Growth Ratio Method (MRP) in Lampung Province aims to obtain information on superior categories in the provincial and district / municipality agribusiness system in Lampung Province. The results of the research using Location Quotient (LQ) analysis tools consist of 1) Category A (Agriculture, Forestry and Fisheries), 2) Category C (Non Oil and Gas Processing Industry) and 3) Category H (Transportation and Warehousing) The Growth Ratio Method (MRP) produces excellent category information to potentially increase economic growth, the flagship category is 1) Category C (Non-Oil and Gas Processing Industry), 2) Category H (Transportation and Warehousing, Category I (Provision of Accommodation and Drinking) , 4) Category M, N (Company Services). Overlay is a combination of two analytical tools namely LQ and MRP, the result of combining to produce superior category in Lampung Province consists of 1) Category C (Non-Oil and Gas Processing Industry) and Category I (Transportation and Warehousing). The purpose of the use of Shift Share analysis tool to find out the situation of change and shifting of economic structure of regency / city in Lampung province, and from Klassen analysis tool by using economic growth indicator and Revenue per Capita of each region as the basis of calculation obtained information of regency / advanced and lagging district / city areas. The results of superior category analysis in the region of Lampung Province on Agribusiness Economy system obtained superior categories and potential to be developed are 1) Category C (Non-Oil and Gas Processing Industry) and Category I (Transportation and Warehousing) and Economic Development of Regency / City Region produce advanced area of Bandar Lampung, Lampung Tengah, South Lampung and Mesuji.

Keywords: Featured Category, LQ, MRP, Overlay and Featured Areas

**ANALISIS KATEGORI UNGGULAN PADA SISTEM
AGRIBISNIS DAN PERKEMBANGAN EKONOMI
WILAYAH KABUPATEN/KOTA
DI PROPINSI LAMPUNG**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi tentang kategori unggulan dan daerah unggulan pada system agribisnis propinsi dan wilayah kabupaten/kota di Propinsi Lampung. Hasil dari penelitian menggunakan alat analisis *Location Quotient (LQ)* terdiri dari 1) Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan), 2) Kategori C (Industri Pengolahan Non Migas) dan 3) Kategori H (Transportasi dan Pergudangan). Alat analisis Metode Ratio Pertumbuhan (MRP) menghasilkan informasi kategori unggulan berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kategori unggulan tersebut adalah 1) Kategori C (Industri Pengolahan Non Migas), 2) Kategori H (Transportasi dan Pergudangan), 3) Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), 4) Kategori M,N (Jasa Perusahaan). *Overlay* adalah gabungan dua alat analisis yaitu *LQ* dan MRP, hasil penggabungan menghasilkan kategori unggulan di Propinsi Lampung terdiri dari 1) Kategori C (Industri Pengolahan Non Migas) dan Kategori I (Transportasi dan Pergudangan). Analisis *Shift Share* untuk mengetahui situasi perubahan dan pergeseran struktur perekonomian kabupaten/kota di propinsi Lampung, dan analisis *Klassen*, dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan per Kapita masing-masing wilayah sebagai dasar perhitungannya diperoleh informasi daerah Kabupaten/Kota Unggulan yaitu Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Mesuji. Hasil dari analisis kategori unggulan di wilayah Propinsi Lampung pada system Perkonomian Agribisnis diperoleh kategori unggulan dan potensial untuk dikembangkan adalah 1) Kategori C (Industri Pengolahan Non Migas) dan Kategori I (Transportasi dan Pergudangan) dan Perkembangan Ekonomi Wilayah Kabupaten /Kota daerah unggulan.

Kata Kunci : Kategori Unggulan, LQ, MRP, Klassen, Overlay dan Wilayah Unggulan

**ANALISIS KATEGORI UNGGULAN PADA SISTEM
AGRIBISNIS DAN PERKEMBANGAN EKONOMI
WILAYAH KABUPATEN/KOTA
DI PROPINSI LAMPUNG**

Oleh :
Edi Susanto

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS

Pada

Program Pascasarjana Magister Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Tesis

: **ANALISIS KATEGORI UNGGULAN PADA
SISTEM AGRIBISNIS DAN PERKEMBANGAN
EKONOMI WILAYAH KABUPATEN/KOTA
DI PROPINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Edi Susanto**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1424021467

Jurusan

: Magister Agribisnis

Fakultas

: Pertanian



Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si.
NIP 19640724 198902 1 002

Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.
NIP 19691003 199403 1 004

2. Ketua Program Pascasarjana Magister Agribisnis

Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.
NIP 19610826 198702 1 001

MENGESAHKAN

1 Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si.**

Sekretaris : **Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Ir. Ali Ibrahim Hasyim., M.S.**

2. Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si
NIP 19611020 198603 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Drs. Mustofa, MA., Ph.D.
NIP 19570101 198403 1 020

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 24 Februari 2018

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul “**ANALISIS KATEGORI UNGGULAN PADA SISTEM AGRIBISNIS DAN PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN/ KOTA DI PROPINSI LAMPUNG**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya peneliti lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Maret 2018
Pembuat Pernyataan


Edi Susanto

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjungkarang pada tanggal, 08 November 1963. Putra ke empat dari sepuluh bersaudara, dari pasangan Bapak Hi. Sudarsono (alm) dan Ibu Hj. Sarwowati.

Riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah tingkat Sekolah Dasar Persit KCK Tanjungkarang pada tahun 1976, Tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Budi Bhakti Persit KCK Tanjungkarang Tahun 1979/1980 dan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Tanjungkarang tahun 1982/1983. Pada tahun 1986 penulis menjadi Aparatur Sipil Negara pada Instansi vertikal Badan Pusat Statistik (BPS) dan pada tahun 1993, penulis melanjutkan pendidikan program tugas belajar di Akademi Ilmu Statistik (AIS) Jakarta kemudian pada tahun 1998 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jakarta.

Pada tahun 2014, penulis tercatat sebagai mahasiswa Pascasarjana pada Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis. Pada saat ini penulis tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu.

MOTTO:

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

AQ. Al Insyirah 5 – 6

PERSEMBAHAN

Dwi Setiarini istriku tercinta yang dengan setia dan sabar mendampingi untuk selalu memberi semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Buat anak-anaku terkasih Mona Aisyah, Fakhriyah Putri dan Rayhannah Shafa Mahirrah yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi semoga perjuangan ini bisa menjadi berguna untuk dunia dan akherat

SANWACANA

Allhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT, atas nikmat iman, ilmu, dan kesehatan, sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah dan penelitian dengan judul tesis Kategori unggulan pada sistem perekonomian agribisnis dan analisis perkembangan ekonomi wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S2 dan memperoleh gelar Magister Sains Program Pascasarjana Magister Agribisnis Universitas Lampung. Seiring dengan selesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banua, M.S. selaku Dekan Fakultas Pertanian.
2. Dr. Ir. M. Irfan Affandi selaku Pembimbing Pertama atas kesabaran keikhlasannya untuk memberikan bimbingan, waktu, ilmu, dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Teguh Endaryanto. SP. M.Si. selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan ikhlas membimbing kepada penulis hingga selesai.
4. Prof. Dr. Ir. Ali Ibrahim Hasyim, M.S. selaku Penguji Utama atas masukan, kritik dan saran yang disampaikan, sangat berguna bagi penyempurnaan tesis ini.
5. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Agribisnis Universitas Lampung.
6. Dr. Ir. Zainal Arifin M.S. selaku Pembimbing Akademi dan pengajar pada Program Pascasarjana Magister Agribisnis Universitas Lampung.
7. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada segenap bapak/ibu pengajar Pascasarjana Magister Agribisnis Universitas Lampung.

Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.S.

Dr. Ir. Dwi Haryono, M.S.

Dr. Ir. Dyah Aring HL M.S.,

Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.S

Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S

Dr. Ir. Wuryaningsih M.S.,

Dr. Ir. Yaktiwo, M.S.,

Dr. Ir. Sudarma Wijaya, M.S.,

Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A.,

Ir. Adia Nugraha, M.S.,

Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.S

Ir. Eka Kasymir, M.S.,

Ir. Suriaty Situmorang, M.S.,
Ir. Hurip Santoso., M.S.
Lina Marlina, S.P.

8. Istriku terkasih. yang selalu setia menemani dan membantuku dan memotivasi agar menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Terima kasih atas segala cinta, doa, perhatian, dan waktunya selama kebersamaan penyelesaian tesis ini. Anak-anakku Mona Aisyah, Fakhriyah Putri dan Rayhannah Syafa Mahirrah sebagai motivator terbesarku saat ini. Kesuksesan ini ayah persembahkan untuk kalian, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.
9. Para sahabat seperjuangan dalam suka dan duka di Pasca Agribisnis 2014, Mas Bambang, Mas Luhur, Abang Yohansyah, Fikri, Gamma, Raden Usman, Edi Gunawan, Lay Timbul Situngkir, Ambo dan Aggi, terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungan moril serta perhatian selama penulis menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan tesis ini
10. Karyawan Pascasarjana Magister Agribisnis (Mbak Ayie, Mb Iin, Mas Boim Mas Bukhori, Mas Kardi) atas bantuan dan perhatiannya selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Lampung; Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna. Dengan segala kekurangan yang ada, penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi kita semua Semoga Allah se lalu memberkahi setiap langkah kita dalam menuntut ilmu dan membalas semua kebaikan semua pihak dalam penyelesaian tesis ini.

Bandar Lampung, 2 April 2018
Penulis

Edi Susanto

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA FIKIR	
A. Tinjauan Pustaka	15
1. Teori Pembangunan	15
2. Pertumbuhan Ekonomi.....	19
3. Teori Pembangunan Ekonomi.....	21
4. Teori Pembangunan Daerah.....	24
5. Pertumbuhan Ekonomi Regional	25
6. Model Pertumbuhan Interregional	28
7. Pembangunan Daerah	28
8. Produk Domestik Regional Bruto	31
9. Sistem Agribisnis	35
10. Hubungan Struktur Perekonomian Nasional dan Sistem Agribisnis ...	39
11. Kategori Unggulan.....	44
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	46
C. Kerangka Pemikiran.....	50
III. METODE PENELITIAN	53
A. Konsep Dasar dan definisi Operasional	53
B. Jenis dan Sumber Data	57
C. Metode Pengumpulan Data.....	58
D. Metode Analisis	58
a. Metode Analisis Tipologi Klassen.....	58
b. Analisis Location Question (LQ).....	60
c. Analisis Shift Share	61
d. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	65
e. Analisis Gabungan LQ, dan MRP (<i>Overlay</i>)	66

IV. GAMBARAN UMUM DAAERAH PENELITIAN	69
1. Keadaan Umum Propinsi Lampung	69
a. Letak Geografis	69
b. Topografi dan Klimatologi	69
c. Demografi	70
d. Administrasi Pemerintahan	71
e. Kondisi Perekonomian Propinsi Lampung	71
f. Kondisi Tenaga Kerja	74
g. Gambaran Umum Pertanian Propinsi Lampung	75
2. Keadaan Umum Kabupaten Lampung Selatan	76
a. Letak Geografis	76
b. Topografi dan Iklim	77
c. Keadaan Demografi	78
d. Gambaran Umum Pertanian	79
e. Administrasi Pemerintahan	80
3. Keadaan Umum Kabupaten Lampung Tengah	80
a. Letak Geografis	80
b. Topografi dan Iklim	81
c. Demografi	81
d. Pertanian.....	82
e. Administrasi Pemerintahan	86
4. Keadaan Umum Kabupaten Mesuji	84
a. Letak Geografis	84
b. Topografi dan Iklim	85
c. Keadaan Demografi	86
d. Pemerintahan.....	86
5. Keadaan Umum Kota Bandar Lampung	86
a. Geografis	87
b. Topografi dan Iklim	87
c. Demografi	89
d. Pemerintahan.....	90
6. Keadaan Umum Kabupaten Lampung Timur	91
a. Letak Geografis, Satuan Wilayah administrasi	91
b. Topografi dan Iklim	92
c. Iklim	95
d. Penggunaan Lahan	95
e. Demografi	95
7. Keadaan Umum Kabupaten Pesawaran	96
a. Kondisi Geografis dan Administratif	96
b. Demografi	97
8. Keadaan Umum Kabupaten Pesisir Barat	98
a. Geografis	98
b. Demografi	101
c. Potensi Pertanian.....	101

V. PEMBAHASAN	103
A. Kategori Unggulan dan Posisi Kabupaten Kota	103
1. Kategori Unggulan	103
2. Analisis Model Ratio Pertumbuhan	112
3. Analisis <i>Overlay</i>	115
4. Analisis Klasen	117
B. Daerah Leading Kategori	124
C. Perkembangan Perekonomian Kabupaten/Kota Pada Tingkat Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Perekonomian.....	127
1. Analisis <i>Shift Share</i>	129
2. Daerah Unggulan	129
3. Daerah Tertinggal	139
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	148
1. Kesimpulan	148
2. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Halaman
Tabel 1. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Propinsi di Pulau Sumatera pada periode tahun 2010 – 2015.....	3
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Per Kapita di Pulau Sumatera berdasarkan Harga Konstan 2010, Periode Tahun 2012– 2015.	4
Tabel 3. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan per Kabupaten/ Kota di Propinsi Lampung tahun 2012 – 2015	5
Tabel 4. Share PDRB Agribisnis terhadap PDRB Total Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung Tahun 2015, ADHKonstan (Milyar Rp)	9
Tabel 5. Perbandingan Antara PDRB dan PDRB Agribisnis	40
Tabel 6. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Propinsi Lampung tahun 2015	70
Tabel 7. Distribusi Produk Regional Domestik Bruto Propinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2015 (persen)	72
Tabel 8. Laju Pertumbuhan PDRB Propinsi Lampung ADHK menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012 – 2015 (persen)	73
Tabel 9. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kegiatan Utama	74
Tabel10. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Lampung Selatan tahun, 2015.....	78
Tabel 11. Produksi, dan luas lahan ditingkat petani berbagai komoditas tanaman pangan di Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2015	79
Tabel 12. Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah 2015.....	81
Tabel 13. Produksi, dan luas lahan digunakan petani berbagai komoditas tanaman pangan di Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2015	83
Tabel.14. Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan, Letak Geografi dan Topografi di Kota Bandar Lampung Tahun 2015	88
Tabel 15. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Bandar Lampung tahun, 2015	90
Tabel 16. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di KabupatenLampung Timur tahun, 2015	96

Tabel 17. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pesawaran, 2015	97
Tabel 18. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Pesawaran tahun, 2015	98
Tabel 19. Kategori Basis dan Non Basis di Propinsi Lampung Tahun 2012 – 2015	103
Tabel 20. Jumlah Kategori Unggulan di Propinsi Lampung dan Daerah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung Tahun 2012	106
Tabel 21. Jumlah Kategori Unggulan di Propinsi Lampung dan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2013.....	107
Tabel 22. Jumlah Kategori Unggulan di Propinsi Lampung dan Daerah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung Tahun 2014	108
Tabel 23. Jumlah Kategori Unggulan di Propinsi Lampung dan Daerah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung Tahun 2015.....	108
Tabel 24. Perkembangan Kategori Unggulan Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung Tahun 2012 – 2015	109
Tabel 25. Volume Kontribusi PDRB pada Kategori Unggulan Kabupaten/Kota terhadap PDRB Kategori Unggulan di Propinsi Lampung	111
Tabel 26. Hasil Perhitungan Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Berdasarkan PDRB Propinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012 – 2015	113
Tabel 27. Hasil Perhitungan Analisis LQ dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Berdasarkan PDRB Propinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012 – 2015	115
Tabel 28. Perkembangan Perubahan Posisi Wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung Periode Tahun 2012 - 2015	123
Tabel 29. Hasil Perhitungan Analisis Location Question Kota Bandar Lampung Tahun 2012 – 2015	125
Tabel 30. Hasil Perhitungan Analisis Location Question Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 – 2015	125
Tabel 31. Hasil Perhitungan Analisis Location Question Kabupaten Lampung TengahTahun 2012 – 2015	126
Tabel 32. Hasil Perhitungan Analisis Location Question Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2015	127
Tabel 33. Hasil Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 – 2015	130
Tabel 34. Hasil Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 – 2015	132
Tabel 35. Hasil Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2015	134
Tabel 36. Hasil Analisis <i>Shift Share</i> Kota Bandar Lampung Tahun 2012–2015	137

Tabel 37. Hasil Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 – 2015	140
Tabel 38. Hasil Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 – 2015	142
Tabel 39. Hasil Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2012 – 2015 .	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. PDRB Per Kapita Propinsi se Propinsi Lampung Tahun 2012 – 1015 (Juta)....	6
2. Kerangka Pemikiran.....	52
3. Klasifikasi Kabupaten/Kota Hasil Analisa <i>Klassen</i> di Propinsi Lampung Tahun 2012.....	119
4. Klasifikasi Kabupaten/Kota Hasil Analisa <i>Klassen</i> di Propinsi Lampung Tahun 2013.....	120
5. Klasifikasi Kabupaten/Kota Hasil Analisa <i>Klassen</i> di Propinsi Lampung Tahun 2014.....	121
6. Klasifikasi Kabupaten/Kota Hasil Analisa <i>Klassen</i> di Propinsi Lampung Tahun 2015.....	122
7. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Lampung, 2012 - 2015	128

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pengembangan wilayah sebagai suatu bentuk intervensi positif terhadap pembangunan di suatu daerah, memerlukan strategi-strategi yang efektif dalam rangka percepatan pembangunan dan akan melalui suatu proses pilihan terhadap pendekatan pembangunan yang terbaik. Pendekatan pengembangan pembangunan tersebut diharapkan tidak hanya menggunakan analisis kategorial ekonomi saja dalam perumusan strategi pembangunan, namun sangat penting untuk memadukannya dengan analisis pada wilayah. Kondisi ini disebabkan dalam proses perencanaan pengembangan wilayah akan selalu berhadapan dengan objek - objek perencanaan yang memiliki kewilayahan. Menurut Conyers dan Hills (1994), perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan meliputi keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai macam alternatif dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa mendatang (Arsyad, 2005).

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan regional secara menyeluruh.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki oleh daerah. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan kategori ekonomi yang dominan (Syafrizal, 1999).

Pembangunan ekonomi regional pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu regional meningkat dalam jangka panjang (Arsyad, 1999). Pembangunan ekonomi regional adalah suatu proses dimana pemerintah regional dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pembangunan wilayah (*regional*) merupakan memaksimalkan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan regional, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan regional dan lingkungan pembangunan secara luas (Adisasmita, 2008). Keterpaduan antar kategorial,

antar wilayah (keruangan), serta antar pelaku (institusi) pembangunan di dalam dan antar daerah menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan wilayah pada era otonomi daerah.

Dibawah ini di dalam table satu di informasikan bahwa perkembangan perkembangan pembangunan yang terjadi yang digambarkan dalam laju pertumbuhan nasional dan laju pertumbuhan wilayah di pulau sumatera pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 1. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Propinsi di Pulau Sumatera pada periode tahun 2010 – 2015

Uraian	2012	2013	2014	2015
1. PDB Nasional	6,12	5,71	5,20	4,98
2. Aceh	3,85	2,61	1,55	-0,72
3. Sumatra Utara	6,45	6,07	5,23	5,10
4. Sumatra Barat	6,31	6,08	5,86	5,41
5. Riau	3,76	2,48	2,70	0,22
6. Jambi	7,03	6,84	7,35	4,21
7. Sumatra Selatan	6,83	5,31	4,70	4,50
8. Bengkulu	6,83	6,07	5,48	5,14
9. Lampung	6,44	5,77	5,08	5,13
10. Bangka Belitung	5,50	5,20	4,67	4,08
11. Kepulauan Riau	7,63	7,21	6,62	6,02

Sumber : BPS, (2015)

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Indonesia tahun 2015 mencapai 4,98 persen sedangkan pada tahun 2014

tingkat pertumbuhan sebesar 5,20 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi di wilayah pulau Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung pada tahun 2015 lebih baik di bandingkan dengan pertumbuhan nasional, walaupun jika dilihat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 juga terlihat mengalami penurunan, angka pertumbuhan propinsi Lampung sebesar 5,13 % dibawah pertumbuhan ekonomi propinsi Bengkulu.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Per Kapita di Pulau Sumatera berdasarkan Harga Konstan 2010, Periode Tahun 2012– 2015.

Propinsi	2012	2013	2014	2015
1. Aceh	23 099,13	23 099,10	23 128,50	22 525,50
2. Sumatra Utara	28 036,88	29 339,20	30 477,10	31 637,40
3. Sumatra Barat	23 744,01	24 857,60	25 978,00	27 044,10
4. Riau	72 396,34	72 297,10	72 385,20	70 761,10
5. Jambi	32 423,64	34 012,10	35 876,10	36 753,40
6. Sumatra Selatan	28 577,89	29 656,80	30 610,60	31 546,60
7. Bengkulu	18 143,51	19 918,30	19 626,50	20 303,80
8. Lampung	21 794,83	22 770,70	23 646,30	24 580,30
9. Bangka Belitung	31 172,42	32 081,30	32 859,60	33 480,10
10. Kepulauan Riau	70 930,00	73 743,30	76 329,70	78 643,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Jika dilihat pada pendapatan per kapita, Propinsi Lampung ternyata terkecil ketiga diatas wilayah propinsi Aceh, pada tahun 2015 sebesar Rp24 580300,-, hal ini menjadi perhatian bagi penulis untuk meneliti mengapa wilayah yang

begitu berpotensi seperti lampung memiliki pendapatan per kapita yang rendah diantara wilayah propinsi yang lain di pulau Sumatra.

PDRB propinsi Lampung merupakan kumpulan secara kumulatif dari PDRB kabupaten/kota, lebih jauh lagi kitadapat mengetahui *share* kabupaten kota terhadap pembentukan PDRB propinsi Lampung serta besaran per kapita dari masing-masing kabupaten kota di wilayah tersebut seperti terlihat dalam table berikut ini:

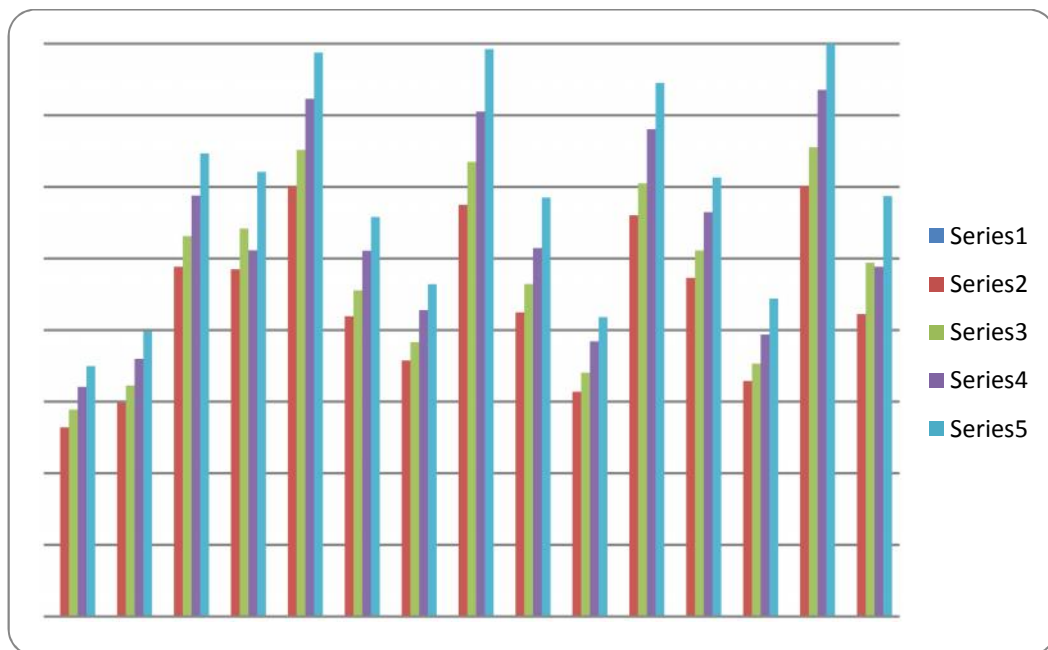
Tabel 3. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan per Kabupaten/ Kota di Propinsi Lampung tahun 2012 – 2015

(Milyar Rp)					
No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
1	Lampung Barat	3,441	3,677	3,883	4,088
2	Tanggamus	7,470	7,976	8,446	8,910
3	Lampung Selatan	20,782	22,114	23,399	24,655
4	Lampung Timur	21,455	23,378	24,048	25,156
5	Lampung Tengah	32,702	34,816	36,793	38,773
6	Lampung Utara	11,334	12,066	12,764	13,457
7	Way Kanan	6,688	7,041	7,439	7,831
8	Tulang Bawang	10,828	11,559	12,198	12,810
9	Pesawaran	7,954	8,448	8,920	9,376
10	Pringsewu	5,367	5,713	6,041	6,356
11	Mesuji	4,841	5,140	5,433	5,717
12	TB. Barat	5,388	5,732	6,046	6,369
13	Pesisir Barat	2,166	2,286	2,402	2,521
14	Bandar Lampung	25,404	27,156	29,033	30,867
15	Metro	2,876	3,074	3,262	3,453
	Propinsi Lampung	170,769	180,620	189,790	199,525

Dari data yang disajikan table diatas pada tahun 2015 terlihat jika ada beberapa daerah kabupaten/kota yang memiliki pendapatan regional yang cukup tinggi, namun disisi lain juga terdapat propinsi yang memiliki pendapatan regional yang rendah. Kabupaten Lampung tengah adalah daerah yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB propinsi

Lampung, kemudian diikuti oleh kotamadya Bandar Lampung, Lampung Timur dan Lampung Selatan.

Sedangkan untuk distribusi pendapatan per kapita, teridentifikasi jika pendapatan tidak terdistribusi secara merata pada kabupaten kota di propinsi Lampung. Ketidak merataan tersebut tergambar pada grafik di bawah ini:



Gambar.1. PDRB Per Kapita Propinsi se Propinsi Lampung Tahun 2012 – 2015(Juta)

Kota Bandar Lampung merupakan daerah yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi dimana pendapatan per kapita pada tahun 2014 mencapai Rp. 36 755 138,- per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jika pusat pembangunan dan pusat perekonomian masih terpusat di wilayah-wilayah tertentu dan yang pada akhirnya menyebabkan ketidak merataan distribusi pendapatan.

Kategori Agribisnis yang merupakan kategori yang menjadi basis dalam perekonomian disebahagian besar wilayah di Indonesia. Juga memiliki keterbatasan untuk dapat menggerakkan roda perekonomian jika tidak di atur dengan baik dalam regulasi kebijakan pemerintah. Sebab dilihat dari perkembangan angka-angka absolut penduduk miskin terus meningkat menjadi lebih dari 14 persen dari total penduduk tahun ini. Lebih buruk lagi, kategori pertanian merupakan sumber penghasilan utama penduduk miskin memiliki tingkat produktivitas terendah. Alasan di balik tingkat produktivitas terendah ini disebabkan banyak faktor seperti terlalu banyak orang yang bergantung pada pertanian yang hampir 50 persen dan wawasan tentang pengelolaan dibidang pertanianpun sebagian besar masih tradisional. Selain itu, ada kebijakan yang kurang tepat dari pemerintah pemerintah, kepemilikan tanah, praktek-praktek pemeliharaan pertanian yang buruk, kurangnya kewirausahaan dll. Atribut ini telah membuat pertanian sebagai sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi sesuatu yang muskil untuk dapat direalisasikan. Sehingga Sebuah strategi yang tepat pada agribisnis memiliki peran penting.

Kategori Agribisnis atau dalam tesis ini diistilahkan sebagai PDRB Agribisnis itu sendiri adalah bagian dari struktur perekonomian yang tercermin dalam PDRB yang terdiri dari beberapa kategori yang antara lain adalah :

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
 - a. Tanaman Pangan

- b. Tanaman Hortikultura
- c. Tanaman Perkebunan
- d. Peternakan
- 2. Kehutanan dan Penebangan Kayu
- 3. Perikanan

B. Industri Pengolahan

- 1. Industri Pengolahan Non Migas
 - a. Industri Makanan dan Minuman
 - b. Industri Pengolahan Tembakau
 - c. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
 - d. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya
 - e. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
 - f. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

C. Perdagangan Besar dan Eceran

- 1. Perdagangan Besar dan Eceran,; Bukan Mobil dan Sepeda Motor

D. Transportasi dan Pergudangan

- 1. Angkutan Rel
- 2. Angkutan Darat
- 3. Angkutan Laut
- 4. Angkutan Sungai Danau
- 5. Angkutan Udara
- 6. Pergudangan dan Jasa Angkutan; Pos dan Kurir

E. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

- 1. Penyedia Akomodasi
- 2. Penyedia Makan Minum

F. Informasi dan Komunikasi

G. Jasa Keuangan dan Asuransi

- 1. Jasa Perantara Keuangan
- 2. Asuransi dan Dana Pensiun
- 3. Jasa Keuangan Lainnya
- 4. Jasa Penunjang Keuangan Lainnya

Dibawah ini ditampilkan data kontribusi PDRB Agribisnis terhadap PDRB total di wilayah Propinsi Lampung sehingga dapat diketahui seberapa kinerja PDRB Agribisnis terhadap Perekonomian di wilayah Propinsi Lampung

Tabel 4. Share PDRB Agribisnis terhadap PDRB Total Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung Tahun 2015, ADHKonstan (Milyar Rp)

No.	Kabupaten/Kota	PDRB adhk 2010	PDRB Agribisnis	Kontribusi
1	Lampung Barat	4,088	3,697	90.44
2	Tanggamus	8,910	5,945	66.72
3	Lampung Selatan	24,655	17,034	69.09
4	Lampung Timur	25,156	13,452	53.47
5	Lampung Tengah	38,773	28,197	72.72
6	Lampung Utara	13,457	9,469	70.36
7	Way Kanan	7,931	5,666	71.45
8	Tulang Bawang	12,810	9,948	77.66
9	Pesawaran	9,376	6,888	73.46
10	Pringsewu	6,356	3,841	60.44
11	Mesuji	5,717	4,613	80.69
12	TB. Barat	6,369	4,978	78.16
13	Pesisir Barat	2,521	1,750	69.42
14	Bandar Lampung	30,867	17,258	55.91
15	Metro	3,453	1,677	48.56
Propinsi Lampung		199,525	131,485	65.90

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa kontribusi PDRB Agribisnis terhadap pembentukan perekonomian di wilayah kabupaten/kota dan propinsi di Propinsi Lampung secara rata – rata masih dominan walaupun ada wilayah kabupaten/kota yang masih dibawah rata-rata seperti kota Metro dan kota Bandar Lampung, Kontribusi PDRB Agribisnis terhadap PDRB Total Propinsi berada pada angka 65,90 persen artinya bahwa Propinsi ini masih sesuai dengan visi dan misi Propinsi Lampung sebagai bumi agribisnis

Wilayah Lampung yang merupakan salah satu wilayah yang berada di pulau sumatera merupakan *hinterland* dari wilayah ibukota dengan posisi yang strategis karena letaknya sangat berdekatan dengan kawasan Jabotabek yang merupakan pusat pengembangan nasional dan menjadi pintu gerbang daerah-daerah di pulau Sumatera ke pulau Jawa. Hal ini merupakan peluang bagi wilayah Lampung untuk lebih terpacu meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dengan memperluas jaringan pemasaran dan perdagangan antar pulau dengan lebih berkonsentrasi pada pengembangan perekonomian agribisnisnya.

Propinsi Lampung merupakan wilayah daratan dengan topografi wilayah yang berupa pegunungan dan berbukit-bukit, yang berada pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki perairan umum berupa sungai dan danau. Iklim daerah Lampung termasuk tropis basah, dengan curah hujan beragam antara 1.297-2.660 milimeter setiap tahun. Suhu udara beragam antara 20°Celsius - 34°Celsius. Lahan sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu, sumber daya alam lainnya yang dimiliki adalah perikanan laut, kehutanan, dan pertambangan yang potensial untuk dikembangkan (Bappeda Propinsi Lampung). Salah satu misi Provinsi Lampung adalah, *Terwujudnya ekonomi daerah yang kuat yang berorientasi nasional dan global*. Hal ini dapat diidentifikasi melalui jumlah pendapatan regional dari masing-masing propinsi yang ada.

Dilatar belakangi akan permasalahan diatas, maka penelitian yang dilakukan adalah selain untuk melihat kategori-kategori apa saja yang menjadi kategori unggulan daerah Lampung, dan untuk melihat letak posisi kategori unggulan

tersebut berada serta untuk mengidentifikasi kategori-kategori yang dikategorikan rendah tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya serta melihat potensi kategori unggulan yang dapat dikembangkan sehingga pada akhirnya dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut juga memberikan informasi kepada pemerintah daerah untuk memperkecil tingkat disparitas antar wilayah tersebut.

B. Rumusan masalah

Provinsi Lampung sebagai daerah dengan letak dan kondisi geografisnya yang strategis antara lain sebagai pintu gerbang Sumatera, *hinterland* dari ibukota negara, daerah penerima transmigran tertua, dan daerah dengan lahan luas yang potensial, secara psikologis mendorong semangat untuk memberdayakan wilayah ini dengan lebih baik lagi. Dalam upaya tersebut maka pemerintah senantiasa menciptakan suasana untuk meningkatkan investasi.

Kemajuan suatu daerah salah satunya digambarkan melalui laju pertumbuhan didalam perekonomiannya, untuk dapat meningkatkan pertumbuhan salah satu alternatifnya adalah dengan meningkatkan investasi sehingga keinginan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan baru dan penanggulangan kemiskinan serta pemerataan pembangunan akan dapat terwujud.

Menurut penggunaannya investasi diartikan sebagai pembentukan modal tetap domestic, dimana investasi merupakan salah satu komponen penting dari permintaan agregat yang merupakan faktor krusial bagi suatu proses

pembangunan (*sustainable development*). Investasi pada hakekatnya langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggirendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, maka setiap negara /daerah berupaya menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.

Wilayah Lampung dengan segenap sumber daya agrbisnis yang dimiliki seharusnya adalah daerah yang potensial menjadi tujuan bagi para investor untuk menanamkan modalnya dan ini haruslah konsentrasi semua baik pihak pemerintah maupun swasta untuk mencari terobosan-terobosan atau inovasi kebijakan yang dapat menarik para investor agar supaya menanamkan modalnya di daerah ini.

Dengan sumber daya yang dimiliki maka pemerintah propinsi Lampung haruslah dapat membuat suatu kebijakan agar dapat memetakan sumber daya mana yang harus menjadi sumber daya unggulan sehingga dapat dijadikan leading kategori didalam meningkatkan pertumbuhan didalam pembangunan ekonomi. Potensi sumber daya apa saja yang dimiliki dan diwilayah mana kategori itu berada. Berbagai program dan kebijakan dalam proses percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Lampung telah dicoba, tetapi ekonomi provinsi ini masih tertinggal dengan provinsi lain.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, identifikasi dan analisis kategori potensi ekonomi di suatu wilayah adalah suatu hal yang penting dilakukan sebelum mengambil kebijakan untuk pembangunan daerah.

Pemetaan sumber daya unggulan antara lain adalah pemetaan sumber daya wilayah dan pemetaan sumber daya kategori-kategori perekonomian sehingga pada akhirnya dari pemetaan sumber daya yang dilaksanakan tersebut akan muncul suatu pertanyaan ***wilayah mana dan kategori apa yang menjadi unggulan yang pada akhirnya akan diprioritaskan untuk dikembangkan sehingga menjadi daerah unggulan dan kategori unggulan.*** di wilayah mana dan Kategori apa yang harus dikembangkan supaya investor berinvestasi di propinsi Lampung.

Ketidak merataan pertumbuhan dan distribusi pendapatan serta ketertinggalan pembangunan merupakan masalah klasik dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Wilayah Lampung merupakan propinsi yang memiliki potensi besar dibidang Agribisnis yaitu sebesar 65,9 persen kontribusinya terhadap PDRB total selayaknya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan wilayah dan diharapkan dengan potensi agribisnis yang dimiliki tersebut dapat dijadikan modal bagi daerah – daerah yang berada di wilayahnya untuk terus meningkatkan PDRB nya.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah :

1. Kategori apa saja yang termasuk Kategori unggulan dan potensial pada sistem agribisnis sehingga dapat dirumuskan prioritas pengembangannya.
2. Daerah mana saja yang menjadi wilayah unggulan dalam kaitannya dengan sumbangan *system* agribisnis terhadap pertumbuhan ekonomi

sehingga dapat dijadikan wilayah leading kategori pertumbuhan perekonomian di wilayah propinsi lampung

3. Bagaimana perkembangan struktur perekonomian kabupaten kota di wilayah propinsi Lampung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Mengetahui kategori unggulan dan potensial pada sistem agribisnis sehingga dapat dirumuskan prioritas pengembangannya.
2. Menganalisis daerah mana saja yang layak di jadikan daerah *leading sector* dalam sistem agribisnis sehingga dapat meningkatkan perekonomian di wilayah propinsi Lampung
3. Menganalisis perkembangan perekonomian masing-masing daerah di wilayah Propinsi Lampung ditinjau dari tingkat pertumbuhan dan perubahan struktur ekonominya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumber informasi bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.
2. Mengetahui Kategori apa saja yang menjadi bases dan unggulan untuk wilayah kabupaten/kota di wilayah Lampung

3. Penelitian ini menjadi sumber pengetahuan dan informasi tentang potensi-potensi di wilayah propinsi Lampung, sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
4. Sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi para peneliti, mahasiswa dan kalangan ilmiah lainnya yang berminat melakukan penelitian dengan tema yang sama.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. TINJUAN PUSTAKA

1. Teori Pembangunan

Ekonomi pembangunan sebagai ilmu, selain berkaitan dengan alokasi sumber-sumber produktif yang langka dengan efisiensi dan sekaligus dengan pertumbuhannya, banyak bersangkut paut dengan formulasi kebijakan pemerintah baik ekonomi maupun non-ekonomi yang di antaranya dengan melibatkan variabel-variabel ekonomi makro secara langsung seperti income, investasi, kesempatan kerja (employment) dan gabungan faktor-faktor non-ekonomi yang sama-sama relevan seperti alokasi sumber daya alam yang efisien, perbaikan institusional, usaha-usaha perbaikan diri, nilai-nilai, sikap-sikap ekonomi dan politik baik dilakukan pemerintah maupun swasta untuk mempercepat dan memperbesar skala tingkat hidup.

Menurut Gina, (2014), pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan, mensejahterakan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan seringkali diarahkan pada pertumbuhan di bidang ekonomi atau kemajuan material. Namun pada kenyataannya, pembangunan di bidang ekonomi saja belum cukup untuk memajukan kualitas hidup masyarakat, karena malah menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan akibat kesenjangan atau ketidakmerataan

distribusi sumber, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam, dan lain-lain. Masyarakat harus mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri, sehingga pembangunan di bidang sosial pun perlu dilaksanakan.

Menurut teori modernisasi, masyarakat Indonesia pada umumnya belum siap untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh. Proses pembangunan terhambat oleh nilai-nilai budaya dan mentalitas masyarakat Indonesia, seperti nilai budaya yang tidak mementingkan mutu atau prestasi, tidak mampu meninggalkan otoritas tradisinya, menganggap hidup selaras dengan alam sehingga timbul konsep tentang nasib, tidak disiplin, kurang bertanggungjawab, tidak berani menanggung resiko, dan lain-lain. Inilah sebabnya negara Indonesia sebagai negara dunia ketiga mengalami keterbelakangan. Di sini terlihat jelas bahwa teori modernisasi ini tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia.

Teori selanjutnya adalah teori dependensi atau ketergantungan. Jika dikaitkan dengan teori ini, pembangunan di Indonesia bisa saja, yaitu dengan menggantungkan pembiayaannya dari batuan luar negeri, dinamakan negara pemberi bantuan tersebut dinamakan negara pusat, sebagai modal asing. Pemberian modal asing ini merupakan sesuatu yang diharuskan bagi negara pusat untuk membantu kemajuan Indonesia. Namun, dalam Kenya taannya, pemberian bantuan tersebut tidak sejalan dengan tujuan awal yang telah disepakati oleh negara-negara pusat. Pemberian modal asing ini dijadikan sebagai jalan bagi negara-negara maju untuk memperoleh keun

tungan yang sebesar-besar dari negara yang mendapat bantuan, seperti Indonesia. Dampak dari konsekuensi dari pemberian bantuan, berupa eksploitasi sumberdaya alam dan pengambilan keuntungan lainnya dari proses pembangunan, menjadikan Indonesia secara perlahan semakin terpuruk kedalam jurang kemiskinan, dikarenakan utang yang membebani semakin banyak. Kekayaan alam yang melimpah di tanah air Indonesia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, dikarenakan posisi lemah sebagai negara yang memiliki hutang pada negara-negara maju. PT. Freeport di Papua, sebagai contoh, telah mengeksploitasi hampir seluruh sumberdaya mineral berharga yang terdeposit di Papua untuk kepentingan negaranya. Ini contoh kerugian besar bagi bangsa Indonesia, akibat dependensi terhadap bantuan luar negeri. Di sini terlihat jelas pula, bahwa teori dependensi ini tidak menguntungkan Indonesia.

Teori yang terakhir adalah teori sistem dunia. Dalam teori ini negara di dunia dibagi atas tiga bentuk negara, yaitu: negara sentral, negara semi pinggiran dan negara pinggiran. Teori ini mengasumsikan hubungan harmonis secara ekonomi yang terjadi di antara negara-negara yang terlibat, yang memberikan kesempatan kepada dua kelompok negara, yaitu semi pinggiran dan pinggiran untuk dapat merubah statusnya menjadi negara sentral yang mapan secara ekonomi. Dalam kajiannya Ishardiono. (2014), disampaikan bahwa perubahan status negara pinggiran menuju semi pingiran ditentukan oleh keberhasilan negara-negara tersebut melaksanakan strategi menangkap dan memanfaatkan peluang, dan strategi lainnya dalam proses pembangunannya. Sementara itu, upaya yang harus

dilakukan oleh negara semi pinggiran untuk dapat menuju negara sentral, adalah memperluas pasar dengan memperkenalkan teknologi modern, dan mampu mempersaingkan produknya dari segi harga dan kualitas.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan perekonomiannya. Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya dimana kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Menurut Smith bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas

pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan ekonomi lebih menitik beratkan pada upaya-upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat atas GDP (gross domestic product) yang disertai dengan perombakan dan modernisasi dari kategori-kategori ekonomi serta memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (income equity) sedangkan pertumbuhan ekonomi lebih kepada upaya kenaikan GDP dan tidak memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya atau tidak. Meskipun tidak semua teori atau model dapat digunakan, namun peranan faktor pengeluaran termasuk buruh, tanah, modal dan pengusaha boleh menjelaskan sebab-sebab berlakunya ketiadaan pembangunan dalam sebuah negara. Pada awalnya, pendapatan perkapita menjadi pengukur utama bagi pembangunan suatu daerah jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang menaik. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa pendapatan perkapita akan mengalami kenaikan terus-menerus. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik dan penurunan ekspor dapat mengakibatkan suatu perekonomian mengalami penurunan tingkat kegiatan ekonominya. Jika keadaan demikian hanya bersifat sementara dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan mengalami pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dan Pertumbuhan ekonomi dua konsep yang sering digunakan dalam membahas Ekonomi Pembangunan dan pada dasarnya tidak lepas dari kaidah-kaidah ilmu ekonomi pembangunan baik secara mikro maupun makro. Pembahasan ilmu ekonomi (economics) selalu berkaitan terutama dengan efisiensi dan alokasi sumber-sumber produktif yang langka (scarcity), dan dengan pertumbuhan yang optimal dari sumber-sumber itu untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar, sedangkan ekonomi pembangunan mempunyai ruang lingkup (scope) yang lebih luas dan kompleks.

3. Teori Pembangunan Ekonomi

Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu negara atau daerah meningkat dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad 1999). Berdasarkan atas definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses dimana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama. Dengan cara tersebut bisa diketahui beberapa peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian sebagai berikut:

- a) Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (discontinuous) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya (Jhingan 2000)
- b) Menurut Irawan dan Suparmoko (1999) pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.
- c) Sadono Sukirno (1985:13) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.
- d) Menurut Sumitro Djojohadikusumo (Sanusi 2004) pembangunan ekonomi adalah suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terusmenerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan, hakikat dari sifat dan proses pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi sesaat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Todaro (Arsyad 1999) juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Nilai pokok tersebut meliputi:

- a) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs);
- b) meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia; dan
- c) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural. Perubahan tersebut terjadi pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi

masyarakat yang bersangkutan. Perubahan peranan kategori ekonomi dalam pembentukan pendapatan nasional disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor tersebut antara lain :

- a) adanya hukum Engels (Law of Engels tentang Elasticity of Income) yang menyatakan semakin tinggi pendapatan karena dilakukan pembangunan terus menerus akan meningkatkan konsumsi terhadap barang-barang industri dan konsumsi terhadap barang pertanian relatif tetap;
- b) adanya perubahan struktur produksi industri yang bersifat compulsory dan inducive secara terus menerus;
- c) adanya comparative advantage pada produk-produk kategori pertanian bagi negara-negara berkembang, sedangkan negara-negara yang sudah maju memiliki competitive advantage pada produk-produk kategori industri (Mahyudi, 2004).

4. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan kategori swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad 1999). Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan meratakan hasil-hasil pembangunan tersebut kepada seluruh lapisan

masyarakat. Berhasil tidaknya pembangunan nasional tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah. Sehingga pembangunan daerah memberikan kontribusi yang besar dalam keberhasilan pembangunan nasional.

Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Jadi pendapatan wilayah menggambarkan perekonomian pada suatu daerah dengan menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi pada daerah tersebut (Tarigan, 2005)

5. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan kategori untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interrelasi. Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang

dibentuk dari berbagai macam kategori ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2008). Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah.

Menurut Glasson (1977) pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen ataupun eksogen, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah, atau kombinasi dari keduanya. Penentu endogen, meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal sedangkan penentu eksogen adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dalam era otonomi daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi daerah masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Oleh karena itu, pembahasan tentang struktur dan faktor penentu pertumbuhan daerah akan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah dalam menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya (Sjafrizal, 2008).

Perubahan sistem pemerintahan menimbulkan perubahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan pembangunan daerah. Pola pembangunan daerah dan sistem perencanaan yang selama ini cenderung seragam telah berubah menjadi lebih bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dihadapi di daerah. Penetapan kebijaksanaan yang sebelumnya hanya sebagai pendukung kebijaksanaan nasional telah mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi yang berkembang di daerah. Kondisi ini juga memicu persaingan antara daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Richardson (2001) perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah perpindahan faktor (factors movement). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan (Sirojuzilam, 2008). Pembangunan dengan pendekatan kategorial mengkaji pembangunan berdasarkan kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam kategori dan sub kategori. Kategori-kategori tersebut adalah kategori pertanian, pertambangan, konstruksi (bangunan), perindustrian, perdagangan, perhubungan, keuangan dan perbankan, dan

jasa. Pemerintah daerah harus mengetahui dan dapat menentukan penyebab, tingkat pertumbuhan dan stabilitas dari perekonomian wilayahnya. Identifikasi kategori dan sub kategori yang dapat menunjukkan keunggulan komparatif daerah merupakan tugas utama pemerintah daerah.

6. Model Pertumbuhan Interregional

Model pertumbuhan ini adalah perluasan dari teori basis ekspor, yaitu dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen. Selain itu model basis ekspor hanya membahas daerah itu sendiri tanpa memperhatikan dampak dari daerah tetangga. Model ini memasukkan dampak dari daerah tetangga, itulah sebabnya maka dinamakan model interregional. Dalam model ini di asumsikan bahwa selain ekspor, pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen dan daerah itu terikat kepada suatu sistem yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat (Tarigan, 2004).

7. Pembangunan Daerah

Menurut Lincolin Arsyad dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, pengertian daerah berbeda-beda tergantung aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu (Arsyad, 1999) :

- 1.a Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi

pendapatan perkapitanya, budayanya, geografisnya dan sebagainya.

Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen

- 1.b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal
- 1.c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.
2. Masalah Pokok Pembangunan Daerah yaitu terletak pada pola pengambilan kebijaksanaan dalam pembangunan ekonomi yang sesuai dengan potensi daerah serta kondisi daerah tersebut. Pelaksanaan pembangunan daerah perlu diupayakan keselarasannya berkesinambungan antara kategori-kategori terkait, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan potensi dan prioritas daerah.
3. Tujuan Pembangunan Daerah Tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) adalah program pembangunan daerah dan program pembangunan kategori yang selaras sehingga keduanya mencerminkan prioritas daerah bersangkutan dan memberi sumbangan kepada pembangunan nasional. Beberapa kemajuan dicapai dalam pembangunan daerah. Dari sisi politis penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, serta pemekaran provinsi dan propinsi telah memberikan ruang gerak

kepada masyarakat di daerah untuk mempercepat pembangunan daerah. Disamping itu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut antara lain tercermin dari meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); berkurangnya pengangguran; meningkatnya akses masyarakat kepada jaringan infrastruktur (khususnya transportasi dan telekomunikasi) maupun fasilitas pendidikan dan kesehatan. Namun demikian peningkatan kondisi sosial dan ekonomi tersebut relatif tidak merata dan sangat bervariasi antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

Strategi Pembangunan Daerah Agar tujuan dan sasaran pembangunan suatu daerah dapat tercapai maka pelaksanaannya harus bertumpu pada strategi pembangunan daerah tersebut. Secara konseptual dan operasional strategi pembangunan daerah mencakup empat strategi, yaitu:

- a. Strategi makro, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Strategi makro dijabarkan dalam strategi dan regional, mengingat perencanaan pembangunan nasional memerlukan dua pengarahan yaitu:

1. Pengarahan kategorial, yaitu kategori-kategori apa dan seberapa jauh masing-masing kategori-kategori akan dikembangkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

2. Pengarahan regional yaitu daerah-daerah mana dan berapa besar masingmasing daerah itu akan dikembangkan dalam rangka sasaran nasional.
- b. Strategi kategorial, perlu diterapkan dalam hubungannya dengan aspek pertumbuhan dan kebijaksanaan trilogi pembangunan nasional.
- c. Strategi nasional, yang berorientasi pada aspek pemerataan
- d. Strategi pemilihan program atau proyek, ini penting dalam rangka pendayagunaan potensi daerah dan penetapan prioritas pembangunan daerah.

8. Produk Domestik Regional Bruto

Informasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Untuk dapat mengukur seberapa jauh keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi salah satu alat yang dapat dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah melalui penyajian angka-angka pendapatan regional. Pendapatan regional didefinisikan sebagai nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam suatu wilayah selama satu tahun (Sukirno, 1985).

Menurut Tarigan (2007), pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah analisis. Tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata

masyarakat pada wilayah tersebut. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan regional. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/propinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2007) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi).

1. Metode Langsung

Penghitungan metode langsung ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil penghitungan yang sama (BPS 2007). Adapun penghitungan PDRB secara langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut:

a. **PDRB Menurut Pendekatan Produksi (Production Approach)**

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui

pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (value added). Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan atau kategori ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari total nilai produksi bruto kategori atau subkategori tersebut. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari kategori/kegiatan yang produksinya berbentuk fisik/barang, seperti pertanian, pertambangan, industri dan sebagainya. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (output) dan nilai biaya antara (intermediate cost), yaitu bahan baku atau penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi (Tarigan 2004). Sesuai dengan namanya yaitu PDRB, yang dihitung dalam hal ini adalah nilai produksinya dalam bentuk barang atau fisik.

Dalam prakteknya, produk ini dihitung berdasarkan kategori-kategori yang menghasilkannya, pada saat ini kategori-kategori pada PDRB telah berubah dalam rinciannya menjadi kategori, dimana kategori tersebut secara keseluruhan terdiri dari 19 kategori dan 38 subkategori dan tercatat dari sumbernya yaitu Badan Pusat Statistik.

b. PDRB Menurut Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). Penghitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang

diterima faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji dan surplus usaha, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung netto (BPS 2007).

c. PDRB Menurut Pendekatan Pengeluaran (Expend. Approach)

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (BPS 2007).

1. Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto atau netto setiap kategori/subkategori pada wilayah yang dialokasikan, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alat ukur tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah setiap kategori dan subkategori (Tarigan 2004:24). Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut:

a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku,

Semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya

antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan,

Semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

9. Sistem Agribisnis

Sistem agribisnis merupakan totalitas atau kesatuan kinerja agribisnis yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu yang berupa kegiatan ekonomi input produksi, informasi, dan teknologi; subsistem usahatani, yaitu kegiatan produksi pertanian primer tanaman dan hewan; subsistem agribisnis pengolahan (manufaktur), subsistem pemasaran; dan subsistem penunjang, yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis.

Agribisnis menurut *Davis dan Goldberg* (1957) didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas produksi dan distribusi sarana produksi usaha tani, aktivitas usaha tani, serta penyimpanan, pengolahan, distribusi komoditas usaha tani, dan aktivitas lain yang membentuk produk tersebut.

Adjid,DA (2001) mengemukakan bahwa agribisnis konsep dari suatu sistem yang integrative yang terdiri dari beberapa subsistem, yaitu :

1. Subsistem Pasokan Input (Agro-input).

Subsistem pasokan input atau kategori masukan ini adalah mewadahi semua pengusaha, baik skala kecil, menengah maupun besar yang menyediakan atau memasok input bagi para petani di subsistem usahatani (on-farm atau agro-production). Mereka adalah para pemasok benih/bibit tanaman, ternak dan ikan; produsen pupuk, pestisida, makanan ternak/ikan, alat dan mesin pertanian, vaksin hewan, bahan bakar; para pemasok tenaga kerja (hewan dan manusia) dan kategori pembiayaan misalnya Bank Pertanian, koperasi kredit, dan sebagainya. Subsistem pemasok input mempunyai peranan penting dalam meningkatkan efisiensi usahatani (penggunaan mesin→mesin pertanian yang dapat menghemat pemakaian tenaga kerja manusia, terutama di daerah kekurangan penduduk) dan produktivitas hasil (penggunaan bibit unggul dan pupuk buatan), serta perluasan usahatani (melalui peminjaman modal dari lembaga pembiayaan usahatani).

2. Subsistem Usahatani (Agro-Production)

Ini adalah kategori pusat (inti) dalam agribisnis. Apabila ukuran, tingkat output, dan efisiensi kategori ini meningkat pesat, kategori lain (off-farm) juga akan ikut berkembang baik. Baik buruknya keadaan kategori ini akan berdampak langsung terhadap situasi keuangan kategori hulu (kategori input) dan kategori hilir (pengolahan dan distribusi/pemasaran). Di Indonesia subsistem ini barangkali yang paling banyak menyerap tenaga

kerja. Di sini berhimpun jutaan petani kecil/gurem, ribuan petani menengah dan ratusan petani skala besar. Di Indonesia tugas untuk memajukan subsistem ini berada di bawah tanggung jawab beberapa departemen yaitu: Departemen Pertanian (komoditas pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan), Departemen Kehutanan (tanaman hutan, lebah madu) dan Departemen Kelautan dan Perikanan (hasil laut dan ikan). Dalam sistem agribisnis, subsistem inilah barangkali yang kinerjanya belum begitu memuaskan (bahkan mungkin yang paling rendah) dibandingkan tiga subsistem yang lainnya.

3. Subsistem Pasca Panen dan Pengolahan (Agro Industry).

Kategori ini bertanggung jawab atas pengubahan bentuk bahan baku yang dihasilkan kategori usahatani menjadi produk konsumsi akhir pada tingkat pengecer. Di AS inilah kategori terbesar di antara subsistem yang lainnya. Di Indonesia kategori ini mungkin nomor dua terbesar, setelah kategori usahatani. Kategori ini menghasilkan nilai tambah paling besar dibandingkan subsistem lainnya. Industri pangan olahan, jamu dan kosmetika, serta industri tekstil di Indonesia banyak dikuasai dan dikendalikan oleh beberapa perusahaan besar baik perusahaan domestik maupun perusahaan asing/multinasional. Karena menghasilkan nilai tambah terbesar maka kategori ini diyakini dapat menjadi kategori penarik bagi kategori usahatani.

4. Subsistem Distribusi dan Pemasaran (Agro Marketing).

Distribusi dan pemasaran produk agribisnis yang efisien perlu diciptakan. Para pelaku di kategori distribusi dan pemasaran melibatkan

para pedagang besar dan pedagang eceran. Para pedagang besar produk primer membeli produk dari pedagang pengumpul atau langsung dari para petani dan menjualnya kembali kepada para pedagang eceran atau kepada perusahaan agroindustri. Untuk pemasaran produk-produk olahan banyak melibatkan para pedagang besar dan ribuan atau bahkan jutaan pedagang eceran di Indonesia usaha di kategori distribusi ini banyak menyediakan lapangan kerja. Khususnya bagi pekerja informal (pedagang kaki lima, pedagang asongan, warung-warung kecil).

5. Subsistem Jasa Pendukung (Agro Supporting).

Komponen-komponen dari subsistem ini meliputi antara lain jasa-jasa: penelitian dan pengembangan (litbang) pendidikan dan pelatihan (diklat), jasa penyuluhan, keuangan dan transportasi. Penyediaan berbagai jasa ini diperlukan untuk membuat sistem agribisnis tersebut lengkap dan bekerja baik. Di Indonesia pemerintah memiliki jasa-jasa yang disebutkan tersebut sehingga pemerintah dapat berfungsi dan bertindak sebagai koordinator sistem. Kegiatan litbang menghasilkan output berupa rakitan teknologi pertanian benih/bibit unggul, masukan kebijakan dan sebagainya yang diperlukan oleh para pelaku agribisnis. Di Indonesia selama ini fungsi tersebut dikerjakan oleh lembaga-lembaga litbang milik departemen. Pendidikan dan pelatihan menawarkan berbagai jasa untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanian dari para pelaku agribisnis. Selanjutnya jasa-jasa penyuluhan. Berbagai bentuk pendidikan non formal, diperlukan untuk mengubah perilaku dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku agribisnis

khususnya di subsistem usahatani (penyuluhan pertanian) dan agroindustri : penyuluhan perindustrian). Tak kalah pentingnya adalah jasa-jasa yang diberikan oleh kategori transportasi dan keuangan yang berfungsi untuk memperlancar arus input dari pemasok input ke usahatani dan arus komoditas dari usahatani ke subsistem agroindustri atau langsung ke konsumen akhir. Selanjutnya lembaga penyedia jasa keuangan berperan dalam membantu tersedianya dana tambahan untuk melakukan perluasan usaha, memanfaatkan peluang usaha baru dan untuk investasi baru.

Dalam pembangunan sistem agribisnis, kelima sub-sistem tersebut beserta usaha-usaha di dalamnya harus dikembangkan secara simultan dan harmonis. Karena itu tugas manajemen pembangunan adalah mengintegrasikan perkembangan kelima sub-sistem tersebut secara harmonis.

Kategori pada sistem Agribisnis adalah kategori yang berkaitan langsung dengan usaha agribisnis itu sendiri. Sehingga didalam pengelompokannya pengertian kategori didalam system Agribisnis disini adalah kategori-kategori dalam struktur perekonomian

10. Hubungan Struktur Perekonomian Nasional dan Sistem Agribisnis

Pengintegrasian struktur perekonomian nasional dijabarkan dalam PDRB terdiri dari 21 kategori kedalam system perekonomian Agribisnis ini merupakan suatu penetapan kategori – kategori yang berhubungan dan berkaitan dengan system perekonomian agribisnis yang dijabarkan kedalam lima subsistem agribisnis.

Tabel 5. Perbandingan Antara PDRB dan PDRB Agribisnis

PDRB	PDRB Agribisnis
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian - Tanaman Pangan - Tanaman Hortikultura - Tanaman Perkebunan - Peternakan - Kehutanan dan Penebangan Kayu - Perikanan	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian - Tanaman Pangan - Tanaman Hortikultura - Tanaman Perkebunan - Peternakan - Kehutanan dan Penebangan Kayu - Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalan - Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi - Pertambangan Batu Bara dan Ligit - Pertambangan Bijih Logam - Pertambangan Dan Penggalan Lainnya	C. Industri Pengolahan - Industri Batubara dan Pengilangan Migas Industri Pengolahan Non Migas - Industri Makanan dan Minuman - Industri Pengolahan Tembakau - Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki - Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya - Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional - Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
C. Industri Pengolahan - Industri Batubara dan Pengilangan Migas Industri Pengolahan Non Migas - Industri Makanan dan Minuman - Industri Pengolahan Tembakau - Industri Tekstil dan Pakaian Jadi - Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki - Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya - Industri kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman - Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional - Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik - Industri Barang Galian bukan Logam - Industri Logam Dasar - Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik - Industri Mesin dan Perlengkapan - Industri Alat Angkutan - Industri Furniture - Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	G. Perdagangan Besar dan Eceran Perdagangan Besar dan Eceran,; Bukan Mobil dan Sepeda Motor
D. Pengadaan Listrik dan Gas - Ketenaga Listrik - Pengadaan Gas dan Produksi Es	H. Transportasi dan Pergudangan - Angkutan Rel - Angkutan Darat - Angkutan Laut - Angkutan Sungai Danau - Angkutan Udara - Pergudangan dan Jasa Angkutan; Pos dan Kurir
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - Penyedia Akomodasi - Penyedia Makan Minum
	J. Informasi dan Komunikasi
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi - Jasa Perantara Keuangan - Asuransi dan Dana Pensiun - Jasa Keuangan Lainnya - Jasa Penunjang Keuangan Lainnya

Tabel 5. Lanjutan

-
1. **Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang**
 2. **Konstruksi**
 - G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**
 1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya
 2. Perdagangan Besar dan Eceran; Bukan Mobil dan Sepeda Motor
 - H. Transportasi dan Pergudangan**
 1. Angkutan Rel
 2. Angkutan Darat
 3. Angkutan Laut
 4. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan
 5. Angkutan Udara
 6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan kurir
 - I. Penyedia Akomodasi dan Makanan Minuman**
 1. Penyediaan Akomodasi
 2. Penyedia Makan Minum
 - J. Informasi dan Komunikasi**
 - K. Jasa Keuangan dan Asuransi**
 1. Jasa Perantara Keuangan
 2. Asuransi dan Dana Pensiun
 3. Jasa Keuangan Lainnya
 4. Jasa Penunjang Keuangan
 - L. Real Estate**
 - M,N. Jasa Perusahaan**
 - O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial**
 - P. Jasa Pendidikan**
 - Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**
 - R,S,T,U. Jasa Lainnya**
-

Pengintegrasian dari kategori yang ada pada PDRB ke dalam system agribisnis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sub-Sistem Agribisnis Hulu (*Down-Stream Agribisnis*)

Kategori yang termasuk dalam system ini adalah :

1. Kategori Pertanian dengan subkategori pembenihan
2. Kategori Industri Pengolahan dengan subkategori Industri Pengolahan

Non Migas yang terdiri dari :

- a. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
- b. Industri Mesin dan Perlengkapan
- c. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan
Mesin Peralatan

b. Sub – Sistem Usaha Tani (*On Farm Agribisnis*)

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Jasa Pertanian:

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
 - a. Tanaman Pangan
 - b. Tanaman Hortikultura
 - c. Tanaman Perkebunan
 - d. Peternakan
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu
3. Perikanan.

c. Sub-Sistem (hilir) Pengolahan (*Up-Stream Agribisnis*)

Ubsistem agribisnis hilir ini terdiri atas dua macam kegiatan diantaranya

Pengolahan komoditas primer dan pemasaran komoditas primer.

Pengolahan komoditas primer yaitu memproduksi produk olahan baik produk setengah jadi maupun barang jadi yang siap konsumsi konsumen dengan menggunakan bahan baku komoditas primer.

Kategori yang termasuk dalam kategori ini adalah :

1. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan subkategori Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor.
2. Kategori Industri Pengolahan dari hasil usaha pada kategori pertanian yaitu subkategori Industri Pengolahan Non Migas yang terdiri dari:
 - Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Ayanan dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
 - Industri kertas dan barang dari kertas
 - Industri Karet, Barang dari karet dan plastic
 - Industri Furniture

d. Sub – Sistem Pemasaran (*Agro Marketing*)

Kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan di dalam dan di luar negeri, termasuk di dalamnya adalah kegiatan distribusi untuk memperlancar arus komoditi dari sentra produksi ke sentra konsumsi, promosi, informasi pasar, serta inteljen pasar (*Marketing intelligence*). Kategori yang termasuk dalam sub-sistem ini adalah:

1. Kategori Transportasi dan Pergudangan
2. Kategori Penyedia Akomodasi dan Makanan Minuman
3. Kategori Informasi dan Komunikasi.

e. Sub – Sistem Jasa Layanan pendukung Agribisnis (*Supporting Institution*)

Menyediakan Jasa bagi sub-sistem agribisnis hulu, sub-sistem usaha tani, dan sub-sistem agribisnis hilir. Termasuk dalam sub-sistem ini adalah penelitian dan pengembangan, perkreditan dan asuransi,

transportasi, Pendidikan, pelatihan dan penyaluran , system informasi dan dukungan kebijakan pemerintah (mikro ekonomi, tata ruang, makro ekonomi) :

1. Kategori Transportasi dan Pergudangan
2. Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi
3. Kategori Jasa Perusahaan
4. Kategori Jasa Lainnya

11. Kategori Unggulan

Kategori unggulan adalah kategori yang salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan Kategori anugerah(endowment factor). Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Menurut Sambodo dalam Sondari (2007), kriteria kategori unggulan akan sangat bervariasi, hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan kategori tersebut dalam perekonomian daerah, antara lain:

- a) kategori unggulan tersebut mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi.
- b) kategori tersebut mempunyai angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar.
- c) kategori tersebut mempunyai keterkaitan antar kategori yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang.
- d) kategori yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi

Kategori unggulan pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional, suatu kategori

dikatakan unggul jika kategori tersebut mampu bersaing dengan kategori yang sama dengan negara lain. Sedangkan dengan lingkup nasional, suatu kategori dapat dikategorikan sebagai kategori unggulan apabila kategori di wilayah tertentu mampu bersaing dengan kategori yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik (Wijaya, 1992). Inti dari teori basis ekonomi menurut Arsyad (1992), menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*).

Kategori unggulan menurut Tumenggung (1996) adalah kategori yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk kategori sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar.

Kategori

unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor (Mawardi, 1997). Kategori unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan kategori lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap kategori unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat

dilakukan dengan memberdayakan potensi kategori unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Rachbini, 2001).

Kategori unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah bersangkutan. Karena di dalam PDRB terkandung informasi yang sangat penting diantaranya untuk melihat output kategori ekonomi (kontribusi masing-masing kategori) dan tingkat pertumbuhan dalam suatu daerah baik daerah provinsi maupun propinsi.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Nurwahidah (2004) dalam tesis yang berjudul Analisis Kategori unggulan dan kontribusi kategori pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa. Tujuan penelitian pada tesis ini adalah ingin mengetahui struktur pertumbuhan perekonomian kategori unggulan dan kontribusi kategori pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa tahun (1997 – 2002). Hasil Analisis LQ (*Location Quotation*) menunjukkan kategori pertanian, kategori bangunan/konstruksi, kategori perdagangan, Hotel dan Restoran dan kategori listrik, gas dan air bersih merupakan kategori basis di Kabupaten Sumbawa. Hasil analisis LQ kontribusi kategori selama periode penelitian (1997 – 2002) kategori pertanian memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa. Hasil analisis Shift Share menunjukkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Sumbawa dapat meningkat sebagai akibat pengaruh pertumbuhan ekonomi Propinsi. Hasil analisis *Klassen Typology* menunjukkan Kabupaten Sumbawa termasuk daerah maju tetapi tertekan. Hasil analisis regresi dan uji t sumbangan PDRB kategori pertanian

menunjukkan pengaruh signifikan terhadap total PDRB, sementara subkategori pertanian tanaman pangan, perikanan, dan perkebunan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PDRB kategori pertanian.

Setiawan (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Peranan Kategori Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pendekatan model yang digunakan dengan alat analisis Input-Output (I-O) Multiregional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat lima (5) kategori unggulan yang meliputi industri makanan dan minuman; Kategori Perdagangan (di Propinsi Jawa Timur); Kategori Hotel dan Restoran; Kategori Peternakan dan hasil-hasilnya (di Propinsi Bali); Kategori Industri makanan, minuman dan tembakau dan hotel dan restoran (di Propinsi Nusa Tenggara Barat). Pertumbuhan kategori-kategori tersebut akan berdampak pada output, nilai tambah Bruto, dan penyerapan tenaga kerja intra dan interregional. Di tingkat nasional, pertumbuhan kategori unggulan di Propinsi Jawa Timur, Bali berdampak lebih besar bila dibandingkan dengan dampak pertumbuhan kategori unggulan di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penelitian Azhar, Fuaidah dan Abdussamad (2003), tentang Analisis Kategori Basis dan Non Basis di Propinsi Nangro Aceh Darussalam. Hasil penelitiannya ditemukan yang menjadi kategori basis adalah; kategori pertambangan dan penggalian, sektpr industri pengolahan serta sekot pertanian, sedangkan kategori lainnya menjadi kategori non basis.

Penelitian MujibSaerofi (2005) tentang Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Kategori Potensial di Kabupaten Semarang (Pendekatan Model Basis Ekonomi Dan Swot). Tujuan penelitiannya adalah menentukan kategori yang potensial yang terdapat di Kabupaten Semarang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Hasil penelitiannya diperoleh dua kategori ekonomi yang potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang Kedua kategori yang potensial tersebut adalah kategori industri pengolahan dan kategori jasa-jasa dengan Indeks LQ lebih besar dari satu (kategori basis) dan komponen diferensial (Dj) positif (pertumbuhan cepat).

Penelitian Prayogo (2008) tentang Analisis Kategori Unggulan dengan menggunakan analisis Input – Output. Tujuan penelitiannya adalah ingin melihat kategori unggulan dari dua (2) periode. Hasil peneltian menunjukkan, kategori unggulan bahwa kategori unggulan di Jawa Tengah tahun 2000 adalah kategori industri makanan, minuman dan tembakau, kategori industrilainnya, kategori industri pengilangan minyak dan kategori pengangkutan dan komunikasi. Tahun 2004 hanya terdapat dua kategori yang menjadi kategori unggulan di Jawa Tengah yaitu kategori industri makanan, minuman dan tembakau, dan kategori industri lainnya.

Turuy (2004) dalam penelitiannya tentang Analisis Penentuan Kategori Perekonomian Unggulan Pripinsi Maluku Utara. Model yang digunakan adalah Input-Output

1. Tujuan penelitiannya adalah ingin menentukan kategori perekonomian unggulan di Maluku Utara pada tahun 2001 dengan mengklasifikasikan 24 x 24 kategori dan dianalisis melalui dua (2) pendekatan yaitu:
 - (a). Analisis struktur dengan indikator pendekatan kedepan (forward approach) dan kebelakang (backward approach) dan (b) Analisis kondisi perekonomian dengan indikator angka pengganda output dan pengganda pendapatan.
2. Hasil penelitiannya diperoleh adalah bahwa; (a). Analisis struktur dengan indikator Indeks dayapenyebaran tertinggi adalah Kategori Perdagangan sebesar (2,166) diikuti oleh Kategori Perikanan (1,766) lalu Pertambangan dan Penggalian (1,456), Tanaman bahan makanan (1,2053), Angkutan Laut (1,1702). Sedangkan kategori lainnya penyebarannya kecil. (b). Analisis perekonomian dengan pendekatan angka pengganda menunjukkan bahwa, angka pengganda output tertinggi adalah Industri Pengolahan (1,9254), diikuti Kategori Air bersih (1,8601), Restoran (1,8466), Bangunan (1,8249), Listrik (1,8069), angka pengganda pendapatan menunjukkan bahwa Kategori Jasa Pemerintahan Umum menempati peringkat pertama (1,1027), diikuti Kategori Pertambangan dan Penggalian (0.7726), Tanaman Pangan (0,7320), Perdagangan (0,6558) dan Perkebunan (0,6004).

 Dengan menggunakan klasifikasi kategori atas dasar Indeks Daya Penyebaran dan Indikator Angka Pengganda , menunjukkan bahwa Kategori Indusatri Pengolahan merupakan kategori unggulan dalam membentuk perekonomian di Propinsi Maluku Utara.

C. Kerangka Pemikiran

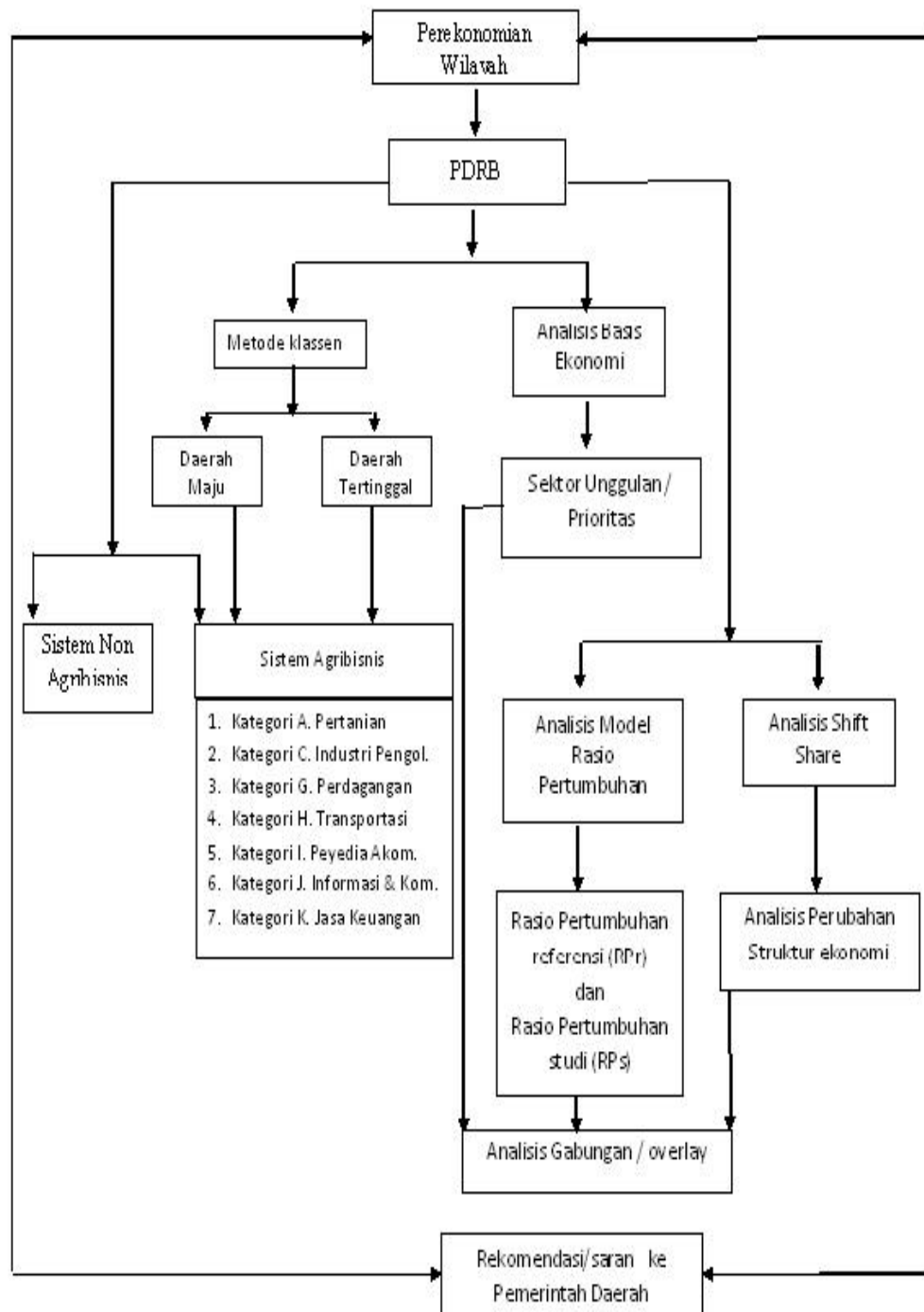
Pada Perekonomian wilayah yang tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto akan terlihat struktur perekonomian juga akan terlihat laju pertumbuhannya wilayah tersebut, adanya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antara daerah satu dengan daerah lainnya merupakan fenomena yang umum dijumpai, terutama di negara berkembang. Namun tentunya bukan sebuah alasan yang tepat untuk kemudian membiarkan situasi tersebut terus berlangsung. Perbedaan tingkat pembangunan tersebut dipengaruhi oleh banyak hal seperti ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, luas daerah, pasar ekspor, kebijakan pemerintah dan faktor-faktor lainnya. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dari laju pertumbuhan pendapatan daerah yang bersangkutan sehingga upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meratakan distribusi pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi antara wilayah di dalam region maupun antar region dan mengembangkan ekonomi secara kategorial maupun antar lintas kategorial yang lebih menguntungkan didukung dengan strategi peningkatan sumber daya manusia Indonesia.

Pertumbuhan suatu daerah terjadi sebagai akibat adanya permintaan barang dan jasa tertentu terhadap suatu daerah oleh daerah lainnya. Semakin tinggi permintaan luar daerah dapat dipenuhi berarti semakin tinggi pula aktivitas

perekonomian lokal dan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan daerah berdasarkan pendekatan wilayah yang sangat umum dikenal adalah teori pertumbuhan berbasis ekspor. Teori pertumbuhan berbasis ekspor didasarkan atas pemikiran bahwa suatu wilayah harus meningkatkan arus atau aliran langsung dari luar wilayah agar bisa tumbuh secara efektif yaitu dengan cara meningkatkan ekspor. Teori pertumbuhan berbasis ekspor memisahkan kegiatan ekonomi dalam dua kategori yang terpisah, yaitu kategori basis dan kategori non basis. Dalam pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto adalah indikator ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto terdiri atas dasar harga berlaku yang digunakan untuk mengetahui pergeseran dan struktur ekonomi dan atas dasar harga konstan yang digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi dari tahun ke tahun.

Teori yang digunakanlah yaitu teori basis ekonomi dengan menggunakan metode *Location Quotient* dapat diketahui kategori-kategori unggulan (potensial) yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, metode *Shift Share* digunakan untuk mengetahui komposisi perubahan struktur perekonomiannya dan metode model rasio pertumbuhan dimana model ini menunjukkan perbandingan pertumbuhan suatu kategori di propinsi tertentu terhadap pertumbuhan kategori yang sama di wilayah yang lebih besar. Apabila nilai $MRPs > 1$ maka pertumbuhan kategori tertentu di propinsi lebih cepat jika dibandingkan dengan kategori yang sama di wilayah yang lebih besar, biasanya dikatakan bahwa sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang dominan. Apabila nilai $MRPs < 1$ maka

pertumbuhan kategori tertentu di suatu propinsi lebih lambat daripada pertumbuhan kategori yang sama di wilayah yang lebih tinggi.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

A. Konsep dasar dan definisi Operasional

Konsep dasar dan definisi operasional dalam penelitian ini mencakup semua pengertian yang digunakan dalam memperoleh dan menganalisis data sesuai tujuan penelitian. wilayah yang akan dibandingkan dalam penelitian ini adalah wilayah penelitian propinsi dengan wilayah administrasi Provinsi Lampung.

- Kategori Unggulan adalah kategori yang mampu melayani pasar di dalam wilayah dan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan Kategori yang sama pada wilayah referensi (acuan) nya (Riadi, 2007)
- Kategori Basis adalah kategori yang melayani pasar di dalam maupun di luar dan merupakan penggerak utama dalam pertumbuhan suatu wilayah yang bersangkutan (Arsyad, 1999)
- Kategori nonbasis adalah kategori yang hanya melayani pasar di dalam wilayah perekonomian yang bersangkutan (Arsyad, 1999)
- Kategori Potensial adalah kategori yang mampu melayani pasar didalam wilayahnya tanpa memiliki keunggulan komparatif atau memiliki keunggulan komparatif namun belum mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya (Riadi, 2008)
- Kategori terbelakang adalah kategori yang tidak mampu memenuhi kebutuhan didalam wilayahnya dan tidak memiliki keunggulan komparataif (Riadi, 2008)

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun), atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang digunakan oleh seluruh unit ekonomi untuk kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor, satuannya adalah rupiah per tahun (Rp/tahun).
- PDRB Agribisnis adalah besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh kategori kategori yang tercantum dalam sistem perekonomian agribisnis
- Harga konstan adalah harga didasarkan pada harga tahun tertentu, seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun lain.
- Harga berlaku adalah harga yang digunakan untuk menilai produksi barang dan jasa sesuai harga yang berlaku pada tahun tersebut.
- Kategori pada Sistem Agribisnis adalah Kategori yang berkaitan langsung dengan usaha agribisnis yang terdiri dari :
 1. Kategori Pertanian (BPS, PDRB) adalah kegiatan sector pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan meliputi usaha cocok tanam, memelihara ternak, penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan, perburuan liar serta penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut, sector tersebut meliputi beberapa subKategori yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.
 - a. Subkategori tanaman bahan makanan meliputi kegiatan penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemungutan hasil-hasil pertanian tanaman pangan.

- b. Subkategori tanaman perkebunan meliputi jenis kegiatan perkebunan yang diusahakan baik oleh rakyat maupun perusahaan perkebunan. Komoditinya meliputi cengkeh, jahe, kakao, karet, kapuk, kayu manis, kelapa, sawit, kemiri, kopi, lada, pala, panili, tembakau, kencur, kunyit, temulawak serta tanaman perkebunan lainnya.
 - c. Subkategori peternakan dan hasil-hasilnya mencakup semua kegiatan pembibitan dan pembudidayaan segala jenis ternak dengan tujuan dipotong dan diambil hasilnya baik oleh rakyat maupun perusahaan. Komoditi subKategori ini adalah sapi, kuda, kerbau, kambing, babi, ayam, itik, sapi perah serta hasil ternak seperti telur, susu dan bulu.
 - d. Subkategori Kehutanan mencakup kegiatan penebangan segala jenis kayu, pengambilan getah, daun, akar, dan kulit kayu, rotan, bamboo, arang dan perburuan binatang hutan lainnya. termasuk kayu dan bamboo di area non hutan.
 - e. Subkategori Perikanan meliputi kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya baik air tawar maupun air asin.
2. Kategori Industri, (BPS, PDRB) sector ini dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu industri pengolahan minyak bumi dan gas bumi dan industri pengolahan tanpa migas. Sedangkan yang termasuk didalam penelitian ini adalah industri non migas antara lain; industri makanan dan minuman, industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya, industri kimia dan barang dari kimia serta karet, industri barang lainnya.

3. Kategori Perdagangan dan Restoran,(BPS, PDRB) subKategori perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, sector ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu perdagangan besar dan eceran dan keduanya digunakan dalam penelitian ini. Dan subKategori Restoran mencakup kegiatan usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan.
 4. Kategori Pengangkutan,(BPS, PDRB) kegiatan yang meliputi jasa angkutan dan jasa penunjang angkutan.
 5. Kategori keuangan (BPS, PDRB) meliputi kegiatan subKategori perbankan yang memberikan pelayanan dibidang keuangan pada pihak lain, seperti menerima simpanan dalam bentuk giro dan tabungan, memberikan pinjaman, transfer/memindahkan rekening koran, membeli dan menjual surat berharga, memberi jaminan bank dan lain sebagainya yang termasuk dalam transaksi keuangan
- Pengganda pendapatan adalah besarnya peningkatan pendapatan suatu wilayah akibat dari peningkatan pendapatan yang diperoleh dari Kategori pertanian dan Kategori perekonomian lainnya sebesar satu rupiah.
 - Komponen *Share* adalah pertambahan PDRB suatu daerah seandainya pertambahannya sama dengan pertambahan PDRB daerah dengan skala yang lebih besar selama periode waktu tertentu.
 - Komponen *Net Shift* adalah komponen nilai untuk menunjukkan penyimpangan dari komponen *Share* dalam ekonomi regional (Arsyad, 1999)

- Komponen *Differential Shift* adalah komponen untuk mengukur besarnya Shift Netto yang digunakan oleh Kategori tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dibandingkan daerah yang skalanya lebih besar (Arsyad, 1999)
- Komponen *Propotional Shift* adalah komponen yang digunakan untuk menghasilkan besarnya *Shift Netto* sebagai akibat dari PDRB daerah yang bersangkutan berubah. Komponen bernilai positif apabila daerah yang diteliti (kota/kabupaten) berspesialisasi dalam Kategori yang di tingkat daerah dengan skala lebih besar (propinsi/nasional) tumbuh lebih cepat, sebaliknya bernilai negatif apabila daerah yang diteliti kota/kabupaten) berspesialisasi pada Kategori yang di tingkat daerah dengan skala lebih besar propinsi/nasional) tumbuh dengan lambat (Arsyad, 1999)
- Daya saing wilayah adalah potensi atau keunggulan komparatif yang dimiliki suatu wilayah dalam mengembangkan Kategori/subKategori pertanian dan Kategori perekonomian lainnya (Arsyad, 1999)

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu PDRB Lampung dan PDRB Kabupaten kota se propinsi Lampung periode 2012-2015, perhitungan dengan menggunakan harga konstan tahun dasar 2010. Sumber data dalam penelitian merupakan data time series Atas Dasar Harga Konstan dari Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan tahun 2010 dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Lampung.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*) dan studi literature dari jurnal – jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada tema yang sama.

D. Metode Analisis

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan beberapa metode analisis data, yaitu :

1. Metode Analisis *Tipologi Klassen* digunakan untuk menentukan suatu dikategori daerah maju ataupun daerah tertinggal.
2. Analisis *Location Quetient* (LQ) digunakan untuk menentukan Kategori basis dan non basis dalam perekonomian wilayah di propinsi Lampung
3. Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran Kategori perekonomian wilayah propinsi Lampung
4. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) digunakan untuk membandingkan pertumbuhan suatu Kategori tertentu di wilayah kabupaten dengan Kategori yang sama di wilayah propinsi.
5. Analisis Gabungan (*Overlay*) LQ, *Shift Share* dan MRP untuk menentukan Kategori/subsktor unggulan dan prioritas

a) Metode Analisis Tipologi Klassen

Alat analisis tipologi klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. tipologi klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua

indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (high growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income), dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income) (Syafrizal, 1997: 27-38; Kuncoro, 1993; Hil, 1989) (Kuncoro, 2002).

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten.
2. Daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten.
3. Daerah berkembang adalah yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten.
4. Daerah relatif tertinggal yaitu adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten

b) Metode Analisis *Location Quotient* (LQ) Analisis Penentu Kategori Basis/Non Basis.

Untuk menentukan Kategori basis dan non basis propinsi di wilayah propinsi Lampung di gunakan metode *analysis Quotient* (LQ). Metode LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami Kategori kegiatan dari PDRB yang menjadi pemacu pertumbuhan. Metode LQ juga digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian, mengarah pada spasialisasi kegiatan perekonomian. Sehingga nilai LQ yang sering digunakan untuk penentuan Kategori basis dapat dikatakan sebagai Kategori yang akan mendorong tumbuhnya atau berkembangnya Kategori lain serta berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan.

Location Quotient adalah rasio dari peranan Kategori lokal tertentu terhadap Kategori yang sama di tingkat ekonomi acuan yang lebih luas. Tingkat acuan ekonomi yang digunakan dalam hal ini adalah berupa perekonomian propinsi sehingga bentuk aljabar hubungan tersebut dinyatakan :

$$LQ_i = \frac{\left(\frac{E_{ij}}{El}\right)}{\left(\frac{E_{ir}}{Er}\right)}$$

Dengan :

LQ_i	= Location Quotient Kategori i perekonomian
E_{ij}	= Produk diKategori i dalam perekonomian propinsi
El	= Total Produk dalam perekonomian lokal
E_{ir}	= Produk total di Kategori I dalam perekonomian propinsi
Er	= Total produk dalam perekonomian propinsi

1. Jika nilai LQ untuk suatu Kategori di perekonomian lokal > 1 , maka dapat dianggap bahwa pangsa pendapatan lokal pada Kategori yang bersangkutan relative lebih tinggi jika dibandingkan dengan pangsa pendapatan rata-rata wilayah acuan, dan ini disebut sebagai Kategori basis.
2. Jika nilai LQ < 1 maka dapat dianggap bahwa pangsa pendapatan lokal pada Kategori yang bersangkutan relative rendah dari pada pangsa pendapatan rata-rata wilayah acuan dan ini disebut dengan Kategori non basis
3. Jika nilai LQ = 1 berarti bahwa tingkat spesialisasi Kategorilokal adalah sama denfgan Kategori yang sama di wilayah acuan.

c) Analisis Shift Share

Analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui perubahan pergeseran pendapatan Kategori pada perekonomian wilayah. Hasil analisis *Shift Share* akan menggambarkan kinerja Kategori-Kategori dalam PDRB antara propinsi dan propinsi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil perbandingan tersebut. Bila penyimpangan tersebut positif, maka dikatakan suatu Kategori dalam PDRB propinsi memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah PDRB propinsi se propinsi lampung dan PDRB Propinsi tahun 2012 – 2015 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010. Perbandingan dengan menggunakan data harga konstan dengan tahun dasar yang sama agar bobot (nilai riil) bias sama dan menjadi valid dalam perbandingannya.

1. Komponen Share (*Propintial Share*)

Merupakan komponen kontribusi dari pertumbuhan perekonomian wilayah acuan secara keseluruhan terhadap perekonomian lokal. Komponen *share* merupakan kondisi pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah acuan dalam periode waktu tertentu dinyatakan dalam bentuk pertumbuhan PDRB. Nilai komponen share menunjukkan tingkat pertumbuhan lokal yang terjadi jika diasumsikan ekonomi lokal tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang sama dengan wilayah acuan (propinsi) (asumsi hal hal lain tidak berkontribusi sehingga pertumbuhan ekonomi lokal hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi acuan). Komponen *Share* juga dapat dianggap sebagai penggerak awal pertumbuhan ekonomi lokal yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan *factor regional*. Tapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi lokal juga di pengaruhi oleh factor-faktor lain, sehingga terjadi simpangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan factor share. Simpangan – simpangan yang terjadi terhadap factor share akibat factor – factor spesifik Kategori dan factor lokal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi lokal(dikenal dengan komponen shift atau pergeseran).

2. Komponen *Shift*

Menunjukkan simpangan yang terjadi terhadap nilai komponen share akibat adanya factor-faktor spesifik Kategorial dan factor-faktor lokal yang mempengaruhi ekonomi lokal yang bersangkutan (dengan kata lain komponen *shift* merupakan koreksi terhadap komponen *share*).

Nilai koreksi akan positif pada daerah ekonomi lokal yang bertambah makmur dalam periode analisis, nilai koreksi akan negative pada ekonomi lokal yang mengalami kemunduran.

Komponen shift terdiri dari :

a. *Proporsional Shift* (P)

Komponen ini sering disebut sebagai komponen struktural atau campuran industry, komponen ini mengukur nilai pergeseran komposisi sktoral yang terjadi pada struktur ekonomi acuan atau perbedaaan antara pertumbuhan Kategori-Kategori secara individual dengan pertumbuhan ekonomi keseluruhan wilayah acuan :

Bernilai positif jika Kategori – Kategori di wilayah acuan mengalami pertumbuhan lebih pesat jika dibandingkan dengan wilayah keseluruhan. Ekonomi wilayah acuan akan bernilai negative jika Kategori – Kategori wilayah acuan mengalami pertumbuhan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan wilayah acuan.

Karena *proporsional shift* merupakan koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi acuan akibat pergeseran Kategorial di struktur ekonomi acuan, maka komponen ini sering disebut juga sebagai kontribusi factor eksternal terhadap ekonomi lokal. Perkembangan Kategori industry di tingkat ekonomi acuan sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan Kategori yang bersangkutan di tingkat lokal.

b. *Differential Shift* (D)

Komponen ini sering disebut sebagai komponen kontribusi pertumbuhan lokal (lokal share). Besaran yang diukur oleh komponen ini adalah simpangan atau pergeseran di Kategori lokal tertentu akibat terjadinya pertumbuhan yang lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan pertumbuhan Kategori –Kategori lokal yang berkembang lebih pesat dibandingkan dengan Kategori yang sama di propinsi dan bernilai negative jika Kategorilokal yang tingkat perkembangannya lebih rendah atau dibawah Kategori sejenis di perekonomian acuan. Besaran *Differential Shift* ini di beberapa referensi sering disebut sebagai keunggulan kompetitif Kategori ekonomi lokal dalam konteks spasial, keunggulan tersebut disebut sebagai keunggulan lokasiional dan perekonomian lokal yang cenderung memiliki keunggulan lokasi akan memberikan nilai koreksi positif. Keunggulan lokasi dapat berupa kemudahan akses ke sumber daya, kedekatan lokasi ke pasar dan sebagainya.

Secara matematis, komponen *Propincial Shift* (PS), *Proporstional Shift* (P) dan *Differential Shift* (D) dapat di formulasikan sebagai berikut (Tarigan, 2007:88; Syarizal, 2008):

1. *Propincial Shift* (PS)

$$PS_{ij} = E_{r,i,t-n} \left(\frac{E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) - E_{r,i,t-n}$$

2. *Proportional Shift* (P)

$$P_{r,i,t} = \left(\frac{E_{N,i,t}}{E_{N,t-n}} \right) - \left(\frac{E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) E_{r,i,t-n}$$

3. *Differential Shift* (D)

$$D_{r,i,t} = E_{r,i,t} \left(\frac{E_{N,i,t}}{E_{N,t-n}} \right) E_{r,i,t-n}$$

4. Total Pertumbuhan

$$\Delta E_{r,it} = (PS_i + P_{i,r,t} + D_{r,i})$$

Dimana :

$E_{r,i,t-n}$	= PDRB Kabupaten Kategori tahun 2011
$E_{r,i,t}$	= PDRB Kabupaten Kategori tahun 2014
$E_{N,t}$	= Jumlah Total PDRB Propinsi Tahun 2011
$E_{N,t-n}$	= Jumlah Total PDRB Ppropinsi Tahun 2014
$E_{N,i,t}$	= PDRB Propinsi Kategori tahun 2011
$E_{N,i,t-n}$	= PDRB Propinsi Kategori tahun 2014

d) Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (MRPs) dalam hal ini adalah Propinsi Lampung dan Model Rasio Pertumbuhan Wilayah Refensi (MRPr), yakni wilayah Nasional.

MRPs Propinsi Lampung menunjukkan perbandingan pertumbuhan suatu Kategori di propinsi tertentu terhadap pertumbuhan Kategori yang sama di wilayah Nasional.

Apabila nilai MRPs > 1 maka pertumbuhan Kategori tertentu di suatu propinsi lebih cepat jika dibandingkan dengan Kategori yang sama di wilayah nasional, bisa dikatakan bahwa Kategori tersebut memiliki pertumbuhan yang dominan.

Apabila $MRPs < 1$ maka pertumbuhan Kategori tertentu di propinsi lebih lambat jika dibandingkan dengan Kategori yang di wilayah nasional. $MRPs = 1$ menunjukkan bahwa pertumbuhan Kategoritertentu di suatu propinsi sama dengan pertumbuhan Kategori yang sama pada wilayah propinsi. Sedangkan MRPr Propinsi Lampung menunjukkan perbandingan pertumbuhan suatu Kategori di wilayah propinsi terhadap pertumbuhan semua Kategori di wilayah nasional. Penjelasan nilai MRPr analog dengan penjelasan pada nilai MRPs yang telah dijelaskan sebelumnya.

e) Analisis Gabungan LQ, dan MRP (Overlay)

Analisis overlay digunakan untuk memetakan potensi yang dimiliki setiap propinsi yang berada di propinsi Lampung. Potensi yang dimaksud adalah hasil analisa *Location Quotient* (LQ), *Shift Share*, dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Untuk mempermudah dalam analisis overlay maka setiap daerah yang memiliki nilai potensi tertentu akan diberikan tanda atau symbol tertentu.

Untuk propinsi yang memiliki nilai $LQ > 1$ untuk Kategori tertentu atau dengan kata lain Kategori tersebut mampu menghasilkan produksi yang lebih untuk konsumsidi propinsi yang bersangkutan maka akan diberi tanda symbol + (positif) sedangkan untuk propinsi dengan Kategori bernilai $LQ < 1$ akan diberi tanda symbol – (negative).

Untuk analisis *Shift Share*, komponen – komponen yang akan digunakan dalam analisis overlay adalah komponen pertumbuhan Proporsional (PP) dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW). Apabila dijumlahkan kedua nilai tersebut akan membentuk komponen baru yang disebut nilai pergeseran bersih (PB) yang akan menunjukkan karakteristik pertumbuhan Kategori tertentu di suatu propinsi.

Jika $PB > 0$ maka pertumbuhan Kategori tertentu di suatu propinsi adalah progresif dan akan diberi symbol + (plus). Jika nilai $PB < 0$ maka Kategori tertentu di propinsi yang bersangkutan memiliki pertumbuhan yang lambat dan akan diberi symbol – (negative). Hasil analisis overlay untuk propinsi di propinsi Lampung tersebut berdasarkan kategori masing-masing berdasarkan tanda pada komponen LQ, Pergeseran Bersih (PB), dan model rasio pertumbuhan (MRP) dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 5. Kriteria kategori pada Analisis Gabungan (Overlay)

Komponen		Kategori
LQ	MRP	
(1)	(2)	(3)
+	+	Surplus, Dominan
+	-	Surplus, Dominan
-	+	Dominan
-	-	Lamban

Dari ketentuan tabel diatas , sebagai contoh apabila suatu Kategori di propinsi tertentu memiliki tanda untuk komponen LQ, dan MRP masing – masing ++, maka dapat disimpulkan bahwa Kategori pada propinsi bersangkutan memiliki kategori surplus atau memiliki produksi yang melebihi konsumsi dalam wilayahnya, pertumbuhan yang progresif dan dominan karena memiliki keunggulan komparatif.

IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

1. Keadaan Umum Propinsi Lampung

a. Letak Geografis

Propinsi Lampung merupakan salah satu propinsi yang terdapat di Pulau Sumatera dengan luas wilayah 35.288,35 Km². Dan memiliki jalur distribusi yang strategis karena terletak di paling ujung Pulau Sumatera dengan akses distribusi berupa selat sunda dan didukung oleh pelabuhan penyebrangan yaitu Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang.

Kedudukan geografis Propinsi Lampung dari timur – barat terletak antara 103°40' - 105°50' Bujur Timur, dan dari utara – selatan terletak antara 6°45' - 3°45' Lintang Selatan.

Batasan geografis Propinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- (a) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
- (b) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia
- (c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
- (d) Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan.

b. Topografi dan Klimatologi

Jenis tanah yang terdapat di Propinsi Lampung pada umumnya adalah jenis tanah alluvial, podsolik coklat, podsolik merah kuning, dan latosol.

Beberapa topografi yang terdapat di Propinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- (a) Daerah topografis berbukit sampai bergunung
- (b) Daerah topografis berombak sampai bergelombang
- (c) Daerah dataran alluvial
- (d) Daerah dataran rawa pasang surut
- (e) Daerah river basin

Propinsi Lampung terletak pada 50 Lintang Selatan di bawah garis khatulistiwa yang mempunyai iklim tropis dengan komposisi dua musim disetiap tahunnya. Rata – rata suhu minimum di Propinsi Lampung adalah antara 21,20C hingga 23,60C, sedangkan rata – rata suhu maksimum berkisar antara 31,40C hingga 34,10C.

c. Demografi

Berdasarkan data Lampung Dalam angka tahun 2016 jumlah penduduk Propinsi Lampung berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 adalah sejumlah 8.117.268 jiwa Yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 4.162.437 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 3.954.831 jiwa.

Kepadatan penduduk di Propinsi Lampung tahun 2015 adalah 234 jiwa/km²

Tabel 6. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur
Di Propinsi Lampung tahun 2015

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Persentase
1	0 - 14	2 318 193	28,56
2	15 - 64	5 407 757	66,62
3	> 65	391 318	4,82
Total		8 117 268	100,00

Sumber : BPS Propinsi Lampung, 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa bahwa penduduk Propinsi Lampung sebagian besar termasuk berada dalam kelompok usia produktif, yaitu berada pada kisaran 15-64 tahun atau sekitar 66,62 % dari total jumlah penduduk. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja di Propinsi Lampung cukup tinggi dan berpotensi baik untuk terus membangun Propinsi Lampung

d. Administrasi Pemerintah

Propinsi Lampung pada awalnya merupakan Keresidenan Lampung yang pada akhirnya sesuai dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Propinsi Lampung. Pada tanggal 17 Juni 1983 Kotamadya Bandar Lampung ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983.

e. Kondisi Perekonomian Propinsi Lampung

Struktur perekonomian wilayah tercermin dari besarnya kontribusi PDRB masing – masing kategori ekonomi terhadap total PDB. Dengan struktur ekonomi wilayah , maka upaya pembangunan ekonomi dapat diarahkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi wilayah. Struktur ekonomi juga dapat dijadikan acuan untuk merencanakan upaya perbaikan struktur, maupun penciptaan struktur ekonomi wilayah yang ideal dalam jangka panjang. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2012-2015) perekonomian Propinsi Lampung dalam perkembangannya masih di dominasi oleh 3 kategori lapangan usaha utama, yaitu kategori Pertanian, Kehutanan

dan Perikanan, kategori Industri Pengolahan dan kategori Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Tabel 7. Distribusi Produk Regional Domestik Bruto Propinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2015 (persen)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014*	2015**
(1)		(4)	(5)	(6)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	33.377	33.015	32.497	32.042
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	8.034	8.359	8.108	8.054
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	17.379	17.701	17.606	17.999
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0.095	0.099	0.104	0.102
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0.108	0.101	0.103	0.101
F	Konstruksi/Construction	8.936	8.750	8.970	8.727
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	12.188	11.885	11.968	11.810
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	4.438	4.504	4.614	4.901
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	1.241	1.242	1.273	1.320
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	3.732	3.858	3.997	4.213
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2.162	2.191	2.108	2.077
L	Real Estat/Real Estate Activities	2.823	2.935	3.008	2.990
M, N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0.128	0.135	0.139	0.143
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence;	3.089	2.993	3.083	3.219
P	Jasa Pendidikan/Education	2.519	2.508	2.649	2.687
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0.924	0.938	0.939	0.954
R, S, T, U	Jasa lainnya/Other Services Activities	0.828	0.810	0.834	0.880
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100.000	100.000	100.000	100.000

Sumber : BPS Propinsi Lampung, 2016

Dominasi tersebut dapat dilihat dari besarnya kontribusi dari masing-masing kategori, yakni pada periode tahun 2012 - 2015 untuk kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) terjadi penurunan dari tahun 2012 sampai dengan 2015, dimana pada tahun 2015 dengan kontribusi sebesar 32,042 persen, untuk kategori C (Industri Pengolahan) terlihat perkembangan kontribusi terhadap PDRB yang selalu meningkat dari tahun ketahun pada periode 2012 – 2015 dimana pada tahun 2015 mencapai, 17,99 persen, selanjutnya kategori G didalam perkembangannya pada periode 2012 – 2015 terlihat dinamis hal ini dapat terlihat dari perubahan yang selalu terjadi disetiap

tahun pada periode tersebut hingga tahun 2015 terlihat kontribusinya sebesar 11,61 persen. Untuk kategori yang lain kontribusi terhadap Produk Regional Domestik Bruto rata – rata dibawah 5 persen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat perekonomian secara riil disuatu wilayah. Pada tahun 2015 perekonomian Propinsi Lampung mengalami peningkatan jika dibandingkan keadaan perekonomian pada tahun sebelumnya.

Tabel 8. Laju Pertumbuhan PDRB Propinsi Lampung ADHK Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012 – 2015 (persen)

Lapangan Usaha/Industry	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(4)	(5)	(6)	(5)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	3.93	4.63	3.42	3.66
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	5.61	11.47	0.93	4.20
C Industri Pengolahan/Manufacturing	9.32	7.74	4.51	7.48
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	15.15	10.97	9.69	3.60
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	4.82	-1.57	7.49	2.47
F Konstruksi/Construction	6.44	3.58	7.70	2.29
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	5.24	2.97	5.98	1.98
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	10.35	7.35	7.65	11.67
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	9.47	5.82	7.73	8.96
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	13.38	9.37	8.84	10.84
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	11.70	7.18	1.11	3.56
L Real Estat/Real Estate Activities	8.29	9.97	7.70	4.49
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	13.90	11.99	8.05	7.97
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence;	6.16	2.49	8.23	9.79
P Jasa Pendidikan/Education	4.50	5.21	11.07	6.65
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	11.62	7.36	5.11	6.81
R,S,T, Jasa lainnya/Other Services Activities	1.79	3.42	8.13	8.51
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	6.44	5.78	5.07	5.13

Sumber : BPS Propinsi Lampung, 2016

Laju pertumbuhan PDRB Lampung tahun 2014 mencapai 5,07 persen, sedangkan tahun 2015 tumbuh sebesar 5,13 persen. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Lampung cenderung menurun walaupun nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2011 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 6,44 persen, hingga pada titik terendah pada tahun 2014 Lampung tumbuh melambat menjadi 5,07 persen. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi meskipun tidak terlalu tinggi yaitu menjadi 5,13 persen.

f. Kondisi Tenaga Kerja

Secara umum sebagaigambaran bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Propinsi Lampung yang melakukan kegiatan bekerja mencapai angka 57,3 persen,

Tabel 9. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Utama

Kabupaten/Kota	bekerja	Mencari Kerja	Sekolah	Mengurus Rmtg	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	71.4	2.6	9.2	14.6	2.2	100.0
Tanggamus	64.5	3.9	6.8	19.7	5.1	100.0
Lampung Selatan	56.9	3.2	7.9	27.7	4.3	100.0
Lampung Timur	64.4	3.1	7.1	20.8	4.6	100.0
Lampung Tengah	68.0	2.1	6.0	21.1	2.8	100.0
Lampung Utara	60.3	5.0	6.7	23.2	4.8	100.0
Way Kanan	66.0	2.4	7.8	20.4	3.4	100.0
Tulang Bawang	59.8	3.3	7.6	27.9	1.4	100.0
Pesawaran	56.7	4.4	9.2	26.1	3.6	100.0
Pringsewu	61.6	2.5	8.1	23.5	4.3	100.0
Mesuji	59.7	3.1	6.8	26.2	4.2	100.0
Tulang Bawang Barat	66.2	1.7	5.8	22.2	4.1	100.0
Bandar Lampung	67.0	3.4	8.7	15.0	2.9	97.0
Metro	56.5	5.3	12.4	22.6	3.2	100.0
Lampung	57.3	3.1	13.6	20.5	5.5	100.0

Sumber : BPS Propinsi Lampung, 2016

berarti ini menggambarkan bahwa sebagian besar atau 57,3 persen penduduk Propinsi Lampung yang memiliki kegiatan untuk bekerja dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan selama paling sedikit satu jam selama seminggu yang lalu dan tidak terputus, kemudian 20,5 persen bekerja mengurus rumah tangga, yang melakukan aktifitas pendidikan atau bersekolah sebesar 13,6 persen sedangkan yang mencari pekerjaan atau juga disebut sebagai tenaga pengangguran adalah mencapai sebesar 3,1 persen.

Persentase tertinggi penduduk yang memiliki aktifitas bekerja di wilayah Propinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Barat yaitu mencapai 71,4 persen, kemudian diikuti Kabupaten Lampung Tengah sebesar 68,0 persen dan yang terendah adalah Kota Metro sebesar 56,5 persen dibawah Propinsi Lampung.

g. Gambaran Umum Pertanian Propinsi Lampung

Propinsi Lampung merupakan salah satu propinsi yang terdapat di Pulau Sumatera dengan luas wilayah 35.288,35 Km². Dengan luas wilayah sebesar itu, Propinsi Lampung memiliki potensi yang besar di kategori pertanian. Menurut data BPS (2015), penggunaan lahan di Propinsi Lampung terbesar digunakan untuk lahan pertanian yang terdiri dari 390.327 hektar untuk persawahan dan 749.097 hektar untuk perkebunan. Kategori pertanian merupakan salah satu kategori yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Propinsi Lampung. Tahun 2015, kategori pertanian memberikan kontribusi sebesar 33,23 persen dari total PDRB Propinsi Lampung, dengan kontribusi subkategori tanaman bahan makanan mencapai 10,54 persen. Di samping itu, tanaman pangan khususnya padi merupakan komoditi

strategis karena merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia umumnya, dan masyarakat Lampung khususnya. Menurut data BPS (2015), produksi padi Provinsi Lampung memperlihatkan tren positif. Produksi padi sebesar 3.320.064 ton naik sekitar 3,52% jika dibandingkan dengan produksi padi pada tahun 2014

2. Keadaan Umum Kabupaten Lampung Selatan

a. Letak Geografis

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105°14' sampai dengan 105°45' Bujur Timur dan 5°15' sampai dengan 6° Lintang Selatan.

Kabupaten Pesawaran tanggal 10 Agustus 2008. Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Selat Sunda;
Sebelah Barat	: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran;
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Laut Jawa.

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan antara lain pulau Krakatau, pulau Sebesi, pulau Sebu, pulau Rimau dan pulau Kandang.

Bila ditinjau dari segi luas dan keadaan alamnya, maka Kabupaten Lampung Selatan mempunyai masa depan cerah untuk lebih berkembang (BPS Lampung Selatan, 2016).

b. Topografi dan Iklim

Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis dengan curah hujan rata-rata 161,7 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan 15 hari/bulan. Temperaturnya berselang antara 21,3°C sampai 33,0°C. Selang kelembaban relatif di Kabupaten Lampung Selatan adalah 39% sampai dengan 100%, sedangkan rata-rata tekanan udara minimal dan maksimal di Kabupaten Lampung Selatan adalah 1.007,4 Nbs dan 1.013,7 Nbs.

Dari segi geologi daerah Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bagian - bagian sebagai berikut:

1. Sebagian besar berbatuan endesit, ditutupi turfazam. Batuan endapan meluas ke timur sampai sekitar alan kereta api arah menuju Kotabumi, keadaan tanah bergelombang sampai berbukit.
2. Pegunungan vulkanis muda.
3. Daratan bagian timur yang termasuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan tidak begitu luas, berbatuan endesit ditutupi turfazam.
4. Dataran alluvial berawa-rawa dengan pohon Bakau.

Di wilayah Kabupaten Lampung Selatan terdapat beberapa sungai yang penting antara lain, Way Sekampung, Way Jelai, Way Ketibung, Way Pisang dan Way Gatal. Pada umumnya, sungai-sungai ini dimanfaatkan untuk mengairi (irigasi) sawah dengan pembuatan dam-dam. Iklim di Kabupaten Lampung Selatan sama halnya

dengan daerah lain di Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh angin Muson, maka daerah Lampung Selatan tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan.

c. Keadaan Demografi

Berdasarkan data pada publikasi Lampung Selatan dalam Angka (2016) jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan menurut hasil proyeksi pada tahun 2015 berjumlah 972.579 jiwa, yang terdiri dari 499.385.347 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki (52,64%) dan 473.194 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan (47,36%). Distribusi penduduk di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 menunjukkan bahwa bahwa penduduk Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar termasuk berada dalam kelompok usia produktif, yaitu berada pada kisaran 15-64 tahun atau sekitar 64,63 % dari total jumlah penduduk.

Tabel 10. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Lampung Selatan tahun, 2015

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Persentase
1	0 - 14	278 839	30,56
2	15 - 64	589 734	64,63
3	> 65	43 917	4,81
Total		912 490	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2016

Hal ini dapat menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Lampung Selatan cukup tinggi dan berpotensi baik untuk terus membangun Kabupaten Lampung Selatan

d. Gambaran Umum Pertanian

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu sentra produksi padi dan jagung di Propinsi Lampung. Jenis tanaman lain yang juga banyak ditanam di Kabupaten

Tabel 11. Produksi, dan luas lahan ditingkat petani berbagai komoditas tanaman pangan di Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2015

No	Jenis Tanaman	Luas Tanam	Produktivitas
1	Padi Ladang	7 425	23 552
2	Padi Sawah	74 376	382 590
	Total Padi	81 801	406 142
3	Jagung	111 632	559 598
4	Ubikayu	6 751	154 696
5	Ubi Jalar	341	3 375
6	Kacang Tanah	463	3 019
7	Kedelei	1 714	1 975
8	Kacang Hijau	297	275

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2016

Lampung Selatan adalah ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kacang kedelai. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel9 yang menggambarkan bahwa bahwa luas panen dan produksi tanaman pangan terbesar di Kabupaten Lampung Selatan adalah jagung yaitumencapai 116.632 ha dengan produksi sebesar 599.598 ton. Hal ini menunjukkan bahwa jagung merupakan komoditi yang paling banyak diusahakan oleh petani di Kabupaten

Lampung Selatan, tetapi produktivitas usahatani jagung di Kabupaten Lampung Selatan masih rendah yakni 4,35 ton per hektar, sehingga masih harus terus ditingkatkan jika dibandingkan dengan kabupaten lain.

e. Administrasi Pemerintahan

Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai luas daerah daratan kurang lebih 2 007,01 km², dengan kantor Pusat Pemerintahan di Kota Kalianda, yang diresmikan menjadi Ibu kota Kabupaten Lampung Selatan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Februari 1982. Sampai saat ini Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami pemekaran dua kali. Pertama berdasarkan Undang - undang Nomor 2 tahun 1997 yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1997 tentang pembentukan Kabupaten Tanggamus. Kemudian yang kedua berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Administrasi

3. Keadaan Umum Kabupaten Lampung Tengah

a. Letak Geografi

Lampung Tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata- rata + 46 meter diatas permukaan laut.

Luas wilayah Lampung Tengah, adalah berupa daratan seluas 4789,82 km²., terletak pada bagian tengah Propinsi Lampung, yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Utara
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Lampung Selatan
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro

d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat

Ibukota Lampung Tengah adalah Gunung Sugih. Secara geografis

Kabupaten Lampung Tengah terletak pada kedudukan garis Bujur, yaitu $104^{\circ} 35'$

Bujur Timur – $105^{\circ} 50'$ Bujur Barat dan garis Lintang, yaitu $4^{\circ} 30'$ Lintang Selatan dan $4^{\circ} 15'$ Lintang Selatan.

b. Topografi dan Iklim

Secara topografis wilayah Kabupaten Lampung Tengah dibagi menjadi lima bagian yaitu, daerah topografi berbukit sampai bergunung, daerah topografi berombak sampai bergelombang, daerah dataran alluvial, daerah rawa pasang surut, dan daerah river basin.

c. Demografi

Distribusi penduduk Kabupaten Lampung Tengah menurut kelompok umur sebagian besar termasuk berada dalam kelompok usia produktif, yaitu berada pada kisaran

Tabel 12. Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah 2015

No	Keterangan	Jumlah Penduduk	Satuan
1	Jumlah Penduduk Keseluruhan	1 239 096	Jiwa
2	Jumlah Kepala Keluarga	333 864	KK
3	Jumlah Penduduk Laki-laki	630 962	Jiwa
4	Jumlah Penduduk Perempuan	608 134	Jiwa
5	Kepadatan Penduduk	256	Jiwa/Km ²

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2016

15-64 tahun atau sekitar 66,5 % dari total jumlah penduduk atau sebesar 828 345 jiwa. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Lampung Tengah cukup tinggi dan berpotensi baik untuk terus membangun Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebesar 50,92 %, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 49,08 %. keluarga dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada table 10.

d. Pertanian

Sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Lampung Tengah dimanfaatkan untuk kategori pertanian, oleh sebab itu kategori pertanian memiliki kontribusi yang cukup besar sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian pokok penduduk di Kabupaten Lampung Tengah. Dari luas wilayah sebesar 4 789,82 km², luas lahan yang digunakan untuk kategori pertanian adalah sebesar 2 041,63 km² atau sebesar 42,62 % dari total luas lahan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu sentra produksi padi, ubi kayu dan jagung di Propinsi Lampung. Jenis tanaman lain yang banyak ditanam di Kabupaten Lampung Tengah antara lain, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kacang kedelai. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 11 menggambarkan bahwa bahwa luas panen dan produksi tanaman pangan terbesar di Kabupaten Lampung Tengah adalah Ubi Kayu yaitu luas lahan yang

dipergunakan mencapai 97 346 ha dan jumlah produksi Ubi Kayu yang dihasilkan mencapai 2 243 832 ton. Hal ini menunjukkan bahwa Ubi Kayu merupakan komoditi

Tabel 13. Produksi, dan luas lahan digunakan petani berbagai komoditas tanaman pangan di Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2015

No	Jenis Tanaman	Luas lahan(Ha)	Produksi (Ton)
1.	Padi ladang	14 320	50 087
2.	Padi sawah	138 807	855 961
	Total padi	153 127	406.142
3.	Jagung	45 823	300 544
4.	Ubikayu	97 346	2 243 832
5.	Ubi jalar	363	7 262
6.	Kacang tanah	733	743
7.	Kedelai	1 026	2 575
8.	Kacang hijau	242	208

Sumber: BPS Lampung Tengah, 2016

yang paling banyak diusahakan oleh petani di Kabupaten Lampung Tengah, dengan produktivitas usahatani Ubi Kayu di Kabupaten Lampung Tengah yakni sebesar 23,55 ton per hektar, dan ini masih bisa untuk terus ditingkatkan.

e. Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu dari 15 kabupaten/kota yang letaknya tepat berada di tengah-tengah Provinsi Lampung. Total luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah 4.789,8 km². Secara Geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak pada 104°35' -105°50' Bujur Timur dan 4°30"-4°15' Lintang Selatan.

Dalam sejarahnya, Kabupaten Lampung Tengah mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah sendiri, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, sejak dikeluarkannya UU Nomor 12 tahun 1999.

Seiring otonomi daerah serta pemekaran wilayah, ibukota Kabupaten Lampung Tengah yang semula berada di Kota Metro, pada tanggal 1 Juli 1999 dipindahkan ke Kota Gunung Sugih. Kegiatan pemerintahan dengan skala kabupaten dipusatkan di Kota Gunung Sugih sedangkan kegiatan perdagangan dan jasa dipusatkan di Kota Bandar Jaya.

4. Gambaran Umum Kabupaten Mesuji

a. Letak Geografi

Secara geografis wilayah Kabupaten Mesuji terletak pada 3.45' – 4.40' arah Utara-Selatan dan 106.15' – 107.00' arah Timur-Barat. Kabupaten Mesuji mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Provinsi Sumatera Selatan.
- b) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering
Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- c) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan
dan Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang
Bawang, serta Kecamatan Way Kenanga Kabupaten
Tulang Bawang Barat.
- d) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Provinsi Sumatera Selatan.

Luas Kabupaten Mesuji sesuai dengan Undang-undang pembentukannya yaitu 2.184 km². Kabupaten Mesuji memiliki 75 desa dengan luas wilayah masing-masing sebagaimana Tabel berikut:

b. Topografi dan Iklim

Pola ketinggian regional yang berkembang pada Wilayah Sungai TulangBawang berdasarkan data BPS dapat dibagi dalam 5 (lima) unit topografi yaitu daerah topografis berbukit sampai bergunung, daerah topografis berombak sampai bergelombang, daerah dataran alluvial, daerah dataran rawa pasang surut. Pada peta kontur digital (1:25.000) terbagi menjadi 3 kelompok yaitu dataran rendah (<50 meter dpl), perbukitan (50 - 500 meter dpl) dan pegunungan (> 500 meter).

Wilayah Sungai Tulang Bawang merupakan daerah yang termasuk ke dalam zone iklim tropika berhujan dengan curah hujan tahunan rata-rata yang cukup tinggi yaitu di atas 2.500 mm. Curah hujan di Wilayah Sungai Tulang Bawang mempunyai spesifikasi yang berbeda antara daerah hulu dan hilir. Di daerah hulu seperti Sumber Jaya, Sekincau, Fajar Bulan, Kasui dan sekitarnya, musim hujan relatif lebih panjang dari musim kemarau. Sebaliknya di daerah hilir seperti Rawa Jitu dan Rawa Pitu, musim hujan relatif lebih pendek dari musim kemarau. Semua sungai utama dan anak sungai di Wilayah Sungai Tulang Bawang merupakan sungai yang mempunyai aliran menerus baik di musim hujan dan musim kemarau. Sebagian wilayah daratan pada wilayah sungai ini adalah rawa-rawa yang berfungsi sebagai penangkap air hujan dan sebagai bantaran sungai.

c. Keadaan Demografi

Pada Tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Mesuji tercatat sebanyak 179.310 jiwa, tahun 2009 sebanyak 182.163 jiwa, dan dalam Sensus Penduduk tahun 2010 sebanyak 187.407 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 10 tahun (2000—2010) sebesar 1,17%. Namun jumlah penduduk Mesuji berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Capil berjumlah 255.202 jiwa terdiri dari laki-laki 134.556 jiwa dan perempuan 120.646 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 35,28%. Lebih jelas mengenai jumlah perkembangan penduduk wilayah Kabupaten Mesuji sebagaimana terlihat pada Tabel 4 dibawah ini.

d. Pemerintahan

1) Pemerintah Daerah

Kabupaten Mesuji merupakan daerah otonomi baru Pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Undang-undang No 49 tahun 2008.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Mesuji dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2012.

5. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Propinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena

merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antarpulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

a. Geografi

Secara geografis kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ}20'$ sampai dengan $5^{\circ}30'$ lintang selatan dan $105^{\circ}28'$ sampai dengan $105^{\circ}37'$ bujur timur. Ibu kota propinsi Lampung ini berada di Bandar Lampung yang terletak diujung pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Pesawaran.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Lampung Selatan.

b. Topografi dan Iklim

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari :

Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di bagian Selatan. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di bagian Utara. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara.

Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, Sukadana Ham, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.

Tabel.14. Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan, Letak Geografi dan Topografi di Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Kecamatan	Letak Geografi		Topografi	
	Pantai	Bukan Pantai	Datar	Berbukit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Teluk Betung Barat	-	5	1	4
2. Teluk Betung Timur	6	-	6	-
3. Teluk Betung Selatan	-	6	2	4
4. Bumi Waras	5	-	5	-
5. Panjang	6	2	6	2
6. Tanjungkarang Timur	-	5	5	-
7. Kedamaian	-	7	6	1
8. Teluk Betung Utara	-	6	6	-
9. Tanjungkarang Pusat	-	7	3	4
10. Enggal	-	6	6	-
11. Tanjungkarang Barat	-	7	2	5
12. Kemiling	-	9	4	5
13. Langkapura	-	5	1	4
14. Kedaton	-	7	6	1
15. Rajabasa	-	7	6	1
16. Tanjung Seneng	-	5	5	-
17. Labuhan Ratu	-	6	6	-
18. Sukarame	-	6	6	-
19. Sukabumi	-	7	3	4
20. Way Halim	-	6	5	1
Jumlah	17	109	90	36

Sumber : Badan Pusat Statistik Bandar Lampung, 2016

Ditengah-tengah kota mengalir beberapa sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpung diwilayah Tanjung Karang, dan Way Kuripan, Way Bala, Way Kupang, Way Garuntang mengalir diwilayah Teluk Betung. Daerah hulu

sungai berada dibagian barat daerah hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu di wilayah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 persen total wilayah landai hingga miring meliputi 35 persen total wilayah dan sangat miring hingga curam meliputi 4 persen total wilayah. Sebagian wilayah kota Bandar Lampung merupakan perbukitan yang diantaranya bernama Gunung Kunyit, Gunung Kelutum, Gunung Banten, Gunung Kucing dan Gunung Kapuk.

c. Demografi

Berdasarkan data pada publikasi Bandar Lampung dalam Angka (2016) jumlah penduduk di Kotamadya Bandar Lampung Selatan menurut hasil proyeksi pada tahun 2015 berjumlah 979 287 jiwa, yang terdiri dari 493 411 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki (50,38%) dan 485 876 4 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan (49,62%). Distribusi penduduk di Kotamadya Bandar Lampung berdasarkan kelompok umur dapat pada table dibawah menunjukkan bahwa bahwa penduduk Kotamadya Bandar Lampung sebagian besar termasuk berada dalam kelompok usia produktif, yaitu berada pada kisaran 15-64 tahun atau sekitar 69,78 % dari total jumlah penduduk.

Tabel 15. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Bandar Lampung tahun, 2015

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Persentase
1	0 - 14	261 425	27,33
2	15 - 64	683 353	66,56
3	> 65	34 509	6,11
Total		1 008 797	100,00

Sumber: BPS Bandar Lampung, 2016

Hal ini dapat menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja di Kotamadya Bandar Lampung cukup tinggi dan berpotensi baik untuk terus membangun Kotamadya Bandar Lampung

d. Pemerintahan

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Propinsi Lampung merupakan keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang No.14 Tahun 1964, keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi propinsi Lampung dengan ibu kotanya TanjungKarang-TelukBetung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan.

Berdasarkan surta keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung nomorG/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan

MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan diwilaya kota Bandar Lampung, maka kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 84 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan, maka kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.

6. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur

a. Letak Geografis, Satuan Wilayah administrasi

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang secara geografis terletak pada posisi 105°15' BT - 106°20' BT dan 4°37' LS - 5°37' LS, dengan batas wilayahnya adalah sebagai berikut.

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Propinsi Banten dan DKI Jakarta
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, yang secara resmi menjadi kabupaten pada tanggal 27 April

1999. Kabupaten Lampung Timur yang beribukota di Sukadana memiliki luas 433.789 km² yang terbagi dalam 257 desa kelurahan dan 24 kecamatan.

b. Topografi dan Iklim

Kondisi topografi di Kabupaten Lampung Timur secara umum meliputi kelaskelerengan datar, berombak, bergelombang, dan berbukit kecil. Sebagian besar daerah di Lampung Timur memiliki topografi datar dan berombak.

Topografi datar mencapai luasan 100.546,09 Ha atau 25,47% dari total luas wilayah Kabupaten Lampung Timur. Wilayah dengan kelerengan sebagian besar datar mencakup Kecamatan Pasir Sakti, LabuhanMaringgai, Purbolinggo, Pekalongan, dan Batanghari, sedangkan topografi berombak mencapai luasan 124.468,23 Haatau mencapai 31,53%. Wilayah dengan kelerengan sebagian besar berombakmeliputi Kecamatan Sukadana, Labuhan Ratu, Metro Kibang, Marga Sekampung, dan Way Jepara. Wilayah dengan topografi bergelombang terdapat di kecamatan Bandar Sribawono, Melinting dan Waway Karya. Luasan total wilayah dengan kelerengan bergelombang mencapai 47.407,67 Ha atau 12,01% dari luasan wilayah Kabupaten Lampung Timur. Topografi ini tersebar di beberapa kecamatan antara lain Bumi Agung, Sukadana, Sekampung Udik, BandarSribawono, Marga Sekampung, Melinting, dan Jabung.

Berdasarkan data yang dimiliki Bapedalda Kabupaten Lampung Timur (2006)dengan berdasarkan pedoman klasifikasi landform menurut Marsoedi et al. (1997)dan Desaunetes (1977), daerah Kabupaten Lampung Timur dibedakan menjadi 6 kelompok landform, yaitu aluvial, marin, fluvio marin, vulkanik,

tektonik/struktural, dan lain-lain. Secara lengkap masing-masing kelompok landform beserta luasannya adalah sebagai berikut.

1. Kelompok Aluvial

Kelompok landform ini di Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam subkelompok dataran banjir, jalur aliran sungai, dataran aluvial, dan depresialuvial dengan bentuk wilayah datar dengan lereng 0-3%. Landform ini terbentuk karena pengendapan dari bahan-bahan endapan sungai yang terdiri dari kerikil, pasir, debu, dan liat. Penyebaran utamanya di sepanjang jalur aliran sungai yang membentuk hamparan dataran banjir di kanan kiri sungai, di daerah cekungan dan daerah rendah.

2. Kelompok Marin

Kelompok marin terbentuk oleh aktivitas marin (laut) yang berupa endapan bahan marin. Adapun di Kabupaten Lampung Timur kelompok landform ini terdiri dari punggung dan cekungan pesisir marin resen dan subresen, dataran pasang surut lumpur, dan rawa belakang pasang surut dengan bentuk wilayah datar sampai agak datar dengan kelerengan 1-3%. Penyebarannya terdapat di bagian pantai sampai beberapa kilometer dari garis pantai ke daratan.

3. Kelompok Fluvio-marine

Kelompok fluvio-marine terbentuk oleh proses fluvial (sungai) dan marin (laut). Adapun di Kabupaten Lampung Timur landform ini digolongkan sebagai dataran fluvio-marine dengan relief datar dengan kelerengan 0-3%.

Penyebarannya terdapat di beberapa lokasi yang merupakan daerah peralihan antara rawa belakang pantai dan beting yang merupakan punggung dan cekungan pesisir subresen dengan daerah aluvial dan daratan.

4. Kelompok Vulkanik

Landform ini membentuk dataran hingga perbukitan yang tersebar di beberapa tempat secara terpisah. Hal ini merupakan ciri batuan terobosan yang menerobos formasi lain. Kelompok ini membentuk dataran vulkan dan perbukitan vulkan agak datar hingga berbukit kecil dengan kelerengannya 1- 25%.

5. Kelompok Tektonik/Struktura

Kelompok *landform* ini merupakan landform yang berbentuk dari Tuf Lampung yang bersusunan bahan halus (liat) hingga kasar (pasir) dan selanjutnya telah mengalami proses tektonisme, yaitu proses pengangkatan, pelipatan, patahan, dan pengikisan/erosi. Adapun di Kabupaten Lampung Timur, proses ini membentuk sub kelompok dataran agak datar hingga berombak. Penyebarannya hampir merata di seluruh wilayah Lampung Timur, terutama di bagian lahan kering, sedangkan sub kelompok yang berasal dari bahan skis dan granit membentuk dataran berombak hingga berbukit kecil dengan kelerengannya 3-25%. Penyebarannya terdapat di bagian barat daya Kabupaten Lampung Timur.

c. Iklim

Iklim wilayah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Sistem Klasifikasi Iklim Schmidt dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B. Hal tersebut dicirikan oleh adanya bulan basah selama 6 bulan (Desember-Juni) dengan temperatur rata-rata berkisar 24-34 °C. Curah hujan rata-rata tahunan berkisar 2000-2500 mm, sedangkan menurut Sistem Klasifikasi Iklim Oldeman, iklim Kabupaten Lampung Timur termasuk tipe C2 dengan jumlah bulan basah 5-6 bulan dan bulan kering 2- 3 bulan.

d. Penggunaan Lahan

Secara luasan, penggunaa lahan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh penggunaan lahan pertanian yang mencapai 55,88%. Luasan hutan mendudukiposisi kedua yaitu seluas 32,32% dari luas wilayah yang merupakan Taman Nasional Way Kambas. Sisanya berupa perkampungan, kawasan industri, padang rumput, semak, rawa, danau, alang-alang, dan emplacement.

e. Demografi

Jumlah Penduduk Lampung Timur pada tahun 2015 berdasarkan angka proyeksi penduduk adalah sebesar 1 008 797 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 516 079 jiwa atau sebesar 51,16 persen sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 492 718 jiwa atau sebesar 48,94 persen. Jika dilihat per kelompok umur jumlah penduduk Kabupaten Lampun Timur itu mengelompok pada usia

produktif pada kelompok umur 15-64 tahun yaitu sebesar 671.489 jiwa atau sebesar 66,56 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur. Artinya Kabupaten Lampung Timur memiliki asset yang bagus untuk stock tenaga kerja sehingga untuk sumber daya manusia daerah ini tidaklah menjadi kendala.

Tabel 16. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Lampung Timur tahun, 2015

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Persentase
1	0 - 14	275.688	27,33
2	15 - 64	671.489	66,56
3	> 65	61.620	6,11
Total		1.008.797	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur 2016

7. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran

a. Kondisi Geografis dan Administratif

Kabupaten Pesawaran merupakan sebuah kabupaten Daerah Otonomi Baru yang merupakan daerah pemekaran Kabupaten Lampung Selatan. Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam tujuh kecamatan, adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katondan Kecamatan Tegineneng Kecamatan Padang Cermin mempunyai luas wilayah terbesar, yakni seluas 31.763 Ha. Kondisi wilayah kabupaten Pesawaran jugaterbentuk oleh pulau besar dan kecil. Tiga pulau terbesar adalah pulau

Legundi, pulau Pahawang dan pulau Kelagian. Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa gunung: Gunung yang tertinggi adalah gunung Way Ratai dan gunung Pesawaranyang memiliki ketinggian 1.681 M dari permukaan laut.

b. Demografi

Besarnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah terutama untuk wilayah yang mempunyai kepadatan tinggi ditambah dengan persebaran penduduknya yang tidak merata menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks, karena pada dasarnya semua kegiatan baik kegiatan perekonomian, kebudayaan, sosial dan lain sebagainya akan melibatkan penduduk.

Berdasarkan data proyeksi penduduk, jumlah penduduk Tahun 2015, Kabupaten Pesawaran memiliki jumlah penduduk 426.389 jiwa, Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, hasil sensus penduduk menunjukkan bahwa di Pesawaran terdapat 219 587 jiwa, penduduk laki-laki dan 206 802 jiwa penduduk perempuan.

Tabel.17 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pesawaran, 2015

Kecamatan	Luas Area		Penduduk		Kepadatan Penduduk
	Km ²	%	Km ²	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Punduh Pidada	113,19	9,64	130 390	3,14	118,30
2. Marga Punduh	111,00	9,46	13 512	3,17	121,73
3. Padang Cermin	127,34	10,85	27 405	6,43	215,21
4. Teluk Pandan	77,34	6,59	35 692	8,37	461,49
5. Way Ratai	112,95	9,62	34 505	8,09	305,49
6. Kedondong	67,00	5,71	33 707	7,91	503,09
7. Way Khilau	64,11	5,46	26 762	6,28	417,44
8. Way Lima	99,83	8,51	30 582	7,17	306,34
9. Gedung Tataan	97,06	8,27	94 204	22,09	970,57
10. Negeri Katon	152,69	13,01	64 707	15,18	423,78
11. Tegineneng	151,26	12,89	51 923	12,18	343,27
Jumlah	1 173,77	100,00	426 389	100,00	363,26

Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran 2016

Distribusi penduduk kabupaten pesawaran berdasarkan kelompok umur produktif dan non produktif yang pada tahun 2015 dapat di lihat pada table dibawah ini

Tabel 18. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Pesawaran tahun, 2015

No.	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase
	0 – 14	122.568	28,77%
	15 – 64	281.344	65,98%
	> 65	22.387	5,25%
	Total	426.389	100,00%

Sumber: BPS Pesawaran , 2016

8. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat

a. Geografis

Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui adalah salah satu dari Lima belas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2012(Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012.

Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat kawasan ekonomi kreatif berbasis alam di Provinsi Lampung, dengan lini kategori di bidang pertanian,perkebunan, kehutanan, kelautan dan pariwisata. Letak Kabupaten Pesisir Barat yang cukup strategis, berbatasan langsung

dengan 2 (dua) Provinsi dan 2 (dua) Kabupaten serta berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, adapun batas Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Lampung Barat, Tanggamu dan Sumatra Selatan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra India
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas $\pm 2.907,23 \text{ Km}^2$ atau 8,39% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, dengan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya sebagai petani dan nelayan.

Secara geografis letak Kabupaten Pesisir Barat pada koordinat : $4^\circ, 40', 0'' - 6^\circ, 0', 0''$ Lintang Selatan dan $103^\circ, 30', 0'' - 104^\circ, 50', 0''$ Bujur Timur.

Secara Topografi Kabupaten Pesisir Barat dibagi menjadi 3 (tiga) unit topografi yakni:

- a. Daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut)
- b. Daerah berbukit (ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut)
- c. Daerah pegunungan (Daerah ketinggian 1.000 sampai dengan 2.000 meter dari permukaan Laut.

Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat umumnya datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Di bagian Barat Laut Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit, yaitu Gunung Pugung (1.964 m), Gunung Sebayon (1.744 m), Gunung Telalawan (1.753 m) dan Gunung Tampak Tunggak (1.744 m).

Wilayah Pesisir Barat di bagian barat mempunyai sungai-sungai yang mengalir pendek dengan pola aliran dendritik yang menyebabkan daerah ini ditandai dengan jarangya banjir sebab pada saat musim hujan datang bersamaan air tidak terkonsentrasi dan timing lagnya menjadi lambat. Delta marine ditandai dengan agregat kasar hasil endapan aluvial vulkanik, hal ini menyebabkan bila air besar muara sungai sering berpindah (meander). Sungai - sungai yang berukuran pendek dan mengalir di lereng terjal seperti ini sukar dikembangkan untuk irigasi, kecuali yang sudah mengalir di daerah delta pantai, umumnya mudah dikembangkan walaupun masih terkena pengaruh pasang surut laut. Pada bagian timur wilayah Pesisir Barat merupakan daerah tangkapan air (catchment area) sungai-sungai besar yang mengalir ke arah timur antara lain : Way Biha, Way Belambang dan sebagainya.

Menurut L Darwis (1979), akibat pengaruh dari rantai pegunungan Bukit Barisan, maka Pesisir Barat memiliki 2 (dua) zone iklim yaitu:

1. Zone A (Jumlah bulan basah > 9 Bulan) terdapat di bagian barat Taman Bukit Barisan Selatan Termasuk Krui dan Bintuhan.
2. Zone BL (Jumlah bulan basah 7 - 9 bulan) terdapat di bagian timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Berdasarkan curah hujan dari Lembaga Meteorologi dan Geofisika, curah hujan Pesisir Barat berkisar antara 2.500 - 3.000 milimeter setahun.

Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 2012. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2

Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebesar ± 136.370 jiwa. Dilihat dari luas wilayah kecamatan Bengkunt Belimbing merupakan kecamatan terluas di kabupaten Pesisir Barat dengan luas wilayah 97.122 ha atau 32,69 %dari luas total Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan untuk luas wilayah kecamatan terkecil adalah kecamatan KruiSelatan dengan luas wilayah 3.625 Ha atau 1,26% dari luas total wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

b. Demografi

Kabupaten Pesisir Barat merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terbentuk pada tahun 2012 hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Jumlah penduduknya hasil dari proyeksi penduduk (BPS) pada tahun 2015 adalah 149 890 jiwa dengan komposisi menurut jenis kelamin laki-laki sebesar 78 693 jiwa dan perempuan sebesar 71 197 jiwa.

c. Potensi Pertanian

Di kategori Pertanian, kabupaten Pesisir Barat memiliki Lahan pertanian yang telah dimanfaatkan sebagai lahan sawah seluas 32.407 ha, dan yang belum dimanfaatkan seluas 2.863 ha. Kabupaten ini juga telah mempunyai komoditas padi unggulan yaitu Padi Ampai, Padi Komojoyo, Padi Sawah Beling, dan Padi Silamaya Muncul yang menghasilkan panen padi yang melimpah dan berkualitas. Dengan besarnya kebutuhan masyarakat yang terus meningkat membuat kategori pertanian mempunyai daya tarik yang kuat dalam peluang ekonomi bisnis.

Untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, maka dibentuklah kelembagaan tani yaitu suatu organisasi atau lembaga-lembaga yang bergerak dibidang pertanian yang bersifat sosial ekonomi yang bertujuan mensejahterahkan anggota-anggotanya.

Kelembagaan tani ini telah berkembang di 11 kecamatan yang terdiri dari, 25 gabungan kelompok tani (Gapoktan). Kelompok tani ini mampu menjadi tempat bagi para petani dalam berkreatifitas untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi. Lahan pertanian kabupaten Pesisir Barat yang telah dimanfaatkan sebagai lahan sawah seluas 32.407 ha, dan yang belum dimanfaatkan seluas 2.863 ha.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan serta kaitannya dengan tujuan penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kategori yang menjadi unggulan di wilayah Propinsi Lampung dari hasil pembahasan dengan menggunakan alat analisis *Location Quetient* (LQ)
 1. Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan),
 2. Kategori C (Industri Pengolahan)
 3. Kategori H (Transportasi dan Pergudangan). lebih intensif

Hasil dari identifikasi tersebut menunjukkan bahwa kategori-kategori tersebut memiliki kekuatan ekonomi cukup baik dan cukup berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Lampung.

Penelitian dengan menggunakan analisis Model Ratio Pertumbuhan (MRP) Kategori yang memiliki pertumbuhan yang dominan pada tingkat nasional maupun tingkat Propinsi Lampung berdasarkan hasil perhitungan MRP adalah :

1. Kategori C (Industri Pengolahan)
2. Kategori H (Transportasi dan Pergudangan)
3. Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)
4. Kategori M,N (Jasa Perusahaan)

Kategori dominan dan potensial dikembangkan untuk wilayah Propinsi Lampung adalah :

1. Kategori Industri Pengolahan
 2. Kategori Transportasi dan Pergudangan
2. Daerah – daerah yang Menjadi wilayah unggulan dalam kaitannya dengan kontribusi pada perekonomian Agribisnis di Propinsi Lampung adalah :
1. Kota Bandar Lampung,
 2. Kabupaten Lampung Selatan,
 3. Kabupaten Lampung Tengah
 4. Kabupaten Mesuji.

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapatlah diinformasikan tentang perubahan struktur perekonomian di wilayah tahun 2012 - 2015 telah mempengaruhi peningkatan PDRB Kabupaten Pesawaran sehingga terjadi pergeseran sebesar Rp 763 299 juta.

3. Propinsi Lampung dan daerah kabupaten/kota se wilayah Lampung.
Perkembangan perubahan struktur perekonomian pada kabupaten/kota di daerah yang mejadi leading kategori pada periode tahun 2012 – 2015 memberikan gambaran perkembangan daerah yang beragam. seperti :
 - a. Kota Bandar Lampung sebagai kota pusat pemerintahan wilayah Propinsi Lampung struktur perekonomian Agribisnisnya adalah struktur perekonomian modern.
 - b. Kabupaten Lampung Selatan merupakan juga daerah maju, perubahan struktur perekonomiannya pada periode tahun 2012-2015 kontribusi

terbesarnya adalah kategori A (Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) ,
dan lebih detail lagi pada subsusb kategori tanaman pangan, dan kategori
C (Industri Pengolahan) serta kategori G (Perdagangan Besar dan
Eceran)

- c. Struktur Perekonomian untuk Kabupaten Lampung Tengah pada periode tahun 2012 - 2015 kontribusi terbesar adalah kategori A (Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) dengan konsentrasi terbesar pada subsub kategori Tanaman Pangan , kategori C (Industri Pengolahan) pada sub kategori Industri Makanan dan Minuman dan kategoi Perdagangan Besar dan Eceran bukan mobil dan sepeda motor.
- d. Perubahan struktur perekonomian Kabupaten Mesuji pada periode tahun 2012 - 2015 didominas ioleh kategori A (Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) dengan konsentrasi pada subkategori perkebunan tahunan dan subkategori tanaman pangan. Kategori C (IndustriPengolahan) dan selanjutnya adalah kategori G (perdagangan Besar dan eceran)
- e. Kabupaten Lampung Timur pada periode tahun 2012 – 2015 struktur perekonomiaanya mengalami perubahan dimana perubahan terbesar terjadi pada A (Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) dan terkonsentrasi pada subkategori pertanian, Peternakan, perburuan dan jasa pertanian kemudian Kategori C (IndustriPengolahan) dan selanjutnya adalah kategori G (perdagangan Besar dan eceran)
- f. Perubahan struktur perekonomian di Kabupaten Pesawaran tidak begitu besar jika dibandingkan dengan perubahan pada kabupaten/kota lain di

wilayah Propinsi Lampung tetapi Kabupaten Pesawaran mengalami perubahan yang positif pada semua kategori pada system PDRB Agribisnis, perubahan terbesar juga hampir merata dimana yang terbesar adalah kategori A (Pertanian, Perikanan dan Kehutanan), kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran) dan kategori c (Industri Pengolahan)

- g. Kabupaten Pesisir Barat adalah Kabupaten yang paling rendah mengalami perubahan struktur perekonomiannya bahkan selama kurun waktu 2012 – 2015 ada kategori yang mengalami penurunan dalam perkembangannya artinya kategori – kategori tersebut mengalami kemunduran dalam perkembangannya sedangkan kategori A, C dan G tetap mengalami perubahan yang positif.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka di ajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya pengembangan dan penanganan yang lebih intensif terhadap kategori unggulan dan kategori daerah leading sektor oleh pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota agar dapat menggerakkan roda perekonomian sehingga percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di wilayah Propinsi Lampung.
2. Perlu penelitian lanjutan untuk menjadi sumber informasi penelitian sejenis pada masa selanjutnya tentang perekonomian di Propinsi Lampung

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R, 2005. *Dasar – Dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adisasmita, R, 2008. *Ekonomi Archipelago*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adjid, D. A. 2001. *Membangun Pertanian Modern*. Yayasan Pengembangan Sinar Tani. Jakarta
- Amir, Hidayat, & Riphah, Singgih, 2005. *Analisis Sektor Unggulan untuk Evaluasi Kebijakan Pembangunan Jawa Timur menggunakan Tabel Input-Output 1994 dan 2000*, Jurnal Keuangan dan Moneter – Departemen Keuangan RI.
- Arsyad, Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE, Yogyakarta.
- Aswandi, H, & Kuncoro, M, 2002. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 17(1), 27-45.
- Azis, Iwan J, 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2012 - 2015*. BPS, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2007. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha*, tahun 2007
- Badan Pusat Statistik, 2014. *Tinjauan Ekonomi Propinsi Lampung, tahun 2011 – 2014*, BPS. Propinsi Lampung
- Badan Pusat Statistik, 2016. *Tinjauan Ekonomi Propinsi Lampung, tahun 2012 – 2015*, BPS. Propinsi Lampung
- Conyers dan Hill 1994. *Perencanaan Pembangunan di dunia ketiga (terjemahan)* Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.

- Glasson, John, 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*, Terjemahan Paul Sitohang, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Irawan dan Suparmoko. 1999. *Ekonomika Pembangunan*. BPFE. Yogyakarta.
- Ishardiono, Wahyu ,2014. <http://ginakesos.blogspot.co.id/2014/08/analisis-teori-pembangunan-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 31 Agustus 2016
- Jhingan, M. L, 1992.*Ekonomi Pembangunan danPerencanaan*, Terjemahan D. Guritno.Rajawali, Jakarta.
- Kuncoro, M, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga, Jakarta
- Marhayanie, 2003.Identifikasi Sektor Ekonomi Potensial dalam Perencanaan Pembangunan Kota Medan.Tesis. Program Pascasarjana USU. Medan.
- Mawardi, I. 1997. *Daya Saing Indonesia Timur Indonesia dan Pengembangan Ekonomi Terpadu*. LP3ES. Jakarta.
- Modul 4, TipologiKlassen, [http://www.scribd.com/doc/2908449/Modul-4-Tipologi - Klassen](http://www.scribd.com/doc/2908449/Modul-4-Tipologi-Klassen), diakses pada tanggal 4 Februari 2016.
- Mukhyi, Muhammad, Abdul. 2009. *Analisis Peranan Subsektor Pertanian dan Sektor Unggulan terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Propinsi Jawa Barat: Pendekatan Analisis IRIO*, Fakultas Ekonomi Gunadarma Jakarta <http://ejournal.gunadarma.ac.id/files/MA%20Mukhyi.pdf>, diakses pada tanggal 9 Februari 2016.
- Rachbini, Didik J, 2001. *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Richardson, Harry W, 2001. *Dasar – Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan Paul Sitohang, Edisi Revisi, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Riadi, M ukti. 2008. *‘Analisis Sektor Ekonomi Potensial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Propinsi Sumatera Selatan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sanusi, Bachrawi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Gunung Agung, Jakarta.

- Sirojuzilam, 2008. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*, Pustaka Bangsa Press. Medan
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Baduose Media, Cetakan Pertama, Padang.
- Sukirno, Sadono, 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan dasar Kebijakan*, LPFE-UI, Jakarta.
- Supangkat, Harlan, 2002. Analisis Penentuan Sektor Prioritas dalam Peningkatan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan dengan menggunakan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB, *Tesis*. Program Pascasarjana USU, Medan.
- Tambunan, Tulus T. H, 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori & Penemuan Empiris*. Salemba Empat Jakarta.
- Tampubolon, Dahlan, 2001. *Pembangunan dan Ketimpangan Wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara*. *Tesis*. Program Pascasarjana USU, Medan.
- Tarigan, Robinson, 2007. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Tumenggung, S. 1996. *Gagasan dan Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kawasan Timur Indonesia)*. Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Dirjen Cipta Karya Departemen PU. Jakarta.
- Todaro, Michael P, 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Edisi Keenam, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2004. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. (<https://fromuti.wordpress.com/2012/04/10/analisis-agribisnis-sebagai-ilmu-ekonomi-dan-sistem-ekonomi/>) diakses pada tanggal 10 April 2016
- Wijaya, F. 1992. *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.
- Oldeman, L.R., Las, I. dan Darwis, S.N. (1979). *An Agroclimatic Map of Sumatra*. Bogor: Contr. Centr. Res. Inst. Agric. 52:1-35